

**MODAL SOSIAL DALAM KEMITRAAN PERTANIAN TEMBAKAU
ANTARA PETANI TEMBAKAU DAN PERUSAHAAN TEMBAKAU
SETELAH ADANYA PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 7 TAHUN
2003 DI DESA KALISAT, KECAMATAN KALISAT,
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya dengan Minat Utama
Sosiologi Lingkungan

Oleh :

Roni Vista Ardi Candra

NIM. 135120101111012



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2018

Tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada para responden yang telah memberikan bantuan data dan informasi selama pelaksanaan penelitian lapangan.

Harapan penulis semoga laporan hasil penelitian skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya sosiologi yang berorientasi pada pemecahan masalah sosiologi pertanian.

Malang, Oktober 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Landasan Konseptual.....	17
2.2.1. Petani Tembakau.....	17
2.2.2. Lembaga Sosial	18
2.3. Landasan Teori	20
2.3.1. Modal Sosial	20
2.3.2. Unsur-Unsur Modal Sosial.....	24
2.4. Kerangka Berpikir	18
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Metode Dan Pendekatan Penelitian	30
3.2. Fokus Penelitian.....	32
3.3. Lokasi Penelitian	32



3.4. Teknik Penentuan Informan	33
3.5. Teknik Pengumpulan Data	35
3.5.1. Observasi.....	35
3.5.2. Wawancara.....	36
3.5.3. Dokumentasi	36
3.6. Jenis Dan Sumber Data.....	37
3.7. Teknis Analisis Data.....	37
3.8. Keabsahan Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	40
4.1 Kondisi Sosial Ekonomi Petani Tembakau Sebelum Perda Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2003.....	40
4.2 Tataniaga Pertanian Tembakau Sebelum Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003	45
4.3 Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pengusahaan Tembakau	49
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	52
5.1 Perubahan Tataniaga Tembakau.....	54
5.1.1 Perubahan Tataniaga A	55
5.1.2 Perubahan Tataniaga B	60
5.2. Modal Sosial Dalam Kemitraan Pertanian Tembakau	62
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
6.1. Kesimpulan.....	77
6.2. Saran	78
6.2.1 Saran Praktis	78
6.2.2 Saran Akademis	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2. Teori Kapital Sosial	24
Tabel 3. Daftar Nama Informan	35



ABSTRACT

Roni Vista Ardi Candra, 2018. Department of Sociology, Faculty of Sosial and Political Sciences, University of Brawijaya, Malang. Social Capital In Tembakau Agricultural Partnership Between Tobacco And Tobacco Companies To The Region Jember Regency Number 7 Of 2003 In Kalisat Village, Kecamatan Kalisat, Jember District.

Advisors: Genta M. Rozalinna, M.A

Tobacco leaves are often referred as "golden leaves", but tobacco farmers face problems from upstream to downstream. The benefits of "golden leaves" are therefore only for the investors, ranging from *bandol* and henchmen to the industry. After the adoption of the 2003 Jember regency Regulation No. 7 on Tobacco Exploitation, a long-trading system eventually become a partnership system. The purpose of this study is to analyze tobacco farmers And Tobacco Companies for establishing relationships after the issuance of the Jember Regency Decree No. 7 of 2003.

This study use the social capital theory of Robert D. Putnam. Social capital consist of three components: trust, networks and norms. In the tobacco-growing system, which use a partnership sistem also use these three components. Social networks that exist in sosial capital theory have two forms: bonding and bridging. This research using qualitative method with descriptive qualitative type of analysis. The data collection is based on observations, interviews and documentations.

Base on field findings, this study having conclusion that changes in the tobacco trade following the entry into force of the Jember Regency Regulation No. 7 of 2003 became a partnership sistem. In the partnership sistem, social capital continues to be maintain and accumulate through the existence of trust, networks and norms. The partner network also use both *bonding* and *bridging*. Strengthening the partnership network strengthens trust through standards.

Keywords: Partnership, Tobacco Trade, Sosial Capital

ABSTRAK

Roni Vista Ardi Candra (2018). Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang. Modal Sosial dalam Kemitraan Pertanian Tembakau Antara Petani Tembakau dan Perusahaan Tembakau Setelah Adanya Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 Di Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember.

Pembimbing: Genta M. Rozalinna, M.A

Daun tembakau biasa disebut “daun emas”, tetapi petani tembakau menghadapi permasalahan dari hulu ke hilir. Sehingga keuntungan dari “daun emas” hanya dinikmati oleh pihak pemodal, mulai dari *bandol* dan kaki tangannya sampai ke pihak industri. Setelah terbitnya Perda Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2003 tentang pengusahaan tembakau, tataniaga yang panjang akhirnya berubah menjadi sistem kemitraan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis petani tembakau dan Perusahaan Tembakau dalam menjalin relasi setelah diberlakukannya Perda Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2003.

Penelitian ini menggunakan teori modal sosial dari Robert D. Putnam, dalam modal sosial terdapat tiga komponen yaitu kepercayaan, jaringan, dan norma. Tataniaga pertanian tembakau yang memakai sistem kemitraan menggunakan tiga komponen tersebut. Jaringan sosial yang ada di dalam modal sosial memiliki dua bentuk yaitu *bonding* dan *bridging*. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif. Sedangkan untuk pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil di lapangan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan tataniaga tembakau setelah berlakunya Perda Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2003 menjadi sistem kemitraan. Sistem kemitraan modal sosial tersebut terus dipelihara dan terakumulasi dengan adanya kepercayaan, jaringan, dan norma. Jejaring kemitraan juga memanfaatkan *bonding* dan *bridging*. Untuk memperkuat jaringan kemitraan ditanamkan kepercayaan yang diperkuat dengan norma.

Kata Kunci: Kemitraan, Tataniaga Tembakau, Modal Sosial

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, sektor pertanian berperan penting dalam keseluruhan perekonomian nasional. Pentingnya sektor pertanian ditunjukkan dengan banyaknya penduduk yang hidup dan bekerja pada sektor pertanian. Kondisi ini dikarenakan Indonesia memiliki sebutan negara agraris yang memiliki tanah subur sehingga sebagian besar masyarakat hidup dengan mengandalkan pada sektor pertanian (Mubyarto, 1989:12). Tembakau merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting di Indonesia. Dari sektor pertanian, perhatian utamanya adalah pada petani tembakau dengan segala aspeknya. Tanaman tembakau memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi petani dan ekonomi pedesaan secara luas (Markus, dkk., 2015:xxvii).

Di Desa Kalisat tembakau merupakan komoditi utama, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perusahaan tembakau. Perusahaan yang besar yaitu Sempurna, Pandusata Utama, Mayangsari, dan Tempurejo. Perusahaan Sempurna adalah salah satu perusahaan rokok terkemuka di Indonesia dengan fasilitas pabrikan dan kantor penjualan di berbagai daerah. Perusahaan Tembakau berafiliasi dengan PT Philip Morris Indonesia yang merupakan bagian dari Philip Morris Internasional, produsen rokok terkemuka dunia.

Perusahaan tersebut sangat membutuhkan adanya petani dalam mensuplay pemenuhan daun tembakau. Jumlah petani tembakau di Desa Kalisat berjumlah 653 petani tembakau. Berkembangnya perusahaan tembakau maka petani sangat dibutuhkan dalam mensuplay tembakau.

Dalam mensuplay tembakau tidak lepas adanya peran desa dimana Desa Kalisat sebagai tempat bertani. Desa Kalisat dilihat dari pengertian desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan pertanian. Menurut Bergel (dalam Murdiyanto, 2008: 38-39), desa sebagai pemukiman petani (*peasant*). Tetapi, menurut Bergel ciri pertanian bukanlah ciri yang selalu melekat pada setiap desa, desa memiliki fungsi sebagai tempat tinggal yang menetap dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil. Desa Kalisat, pertanian masih menjadi ciri dalam desa tersebut. Terlihat dalam mata pencahariaannya mayoritas sebagai petani.

Namun, profesi sebagai petani identik dengan masyarakat miskin dalam berbagai sektor riil. Wolf (1985:5-10) menerangkan masyarakat petani identik dengan masyarakat yang primitif (*tribe*) tingkat lanjut tetapi belum sampai pada tahap masyarakat industri. Maksud dari kalimat sebelumnya adalah masyarakat petani berada pada posisi pertengahan antara masyarakat primitif dengan masyarakat industri. Masyarakat petani cenderung dicerminkan sebagai masyarakat yang tidak memiliki struktur dan merupakan masyarakat tradisional yang terjalin oleh nilai-nilai tradisi.

Dalam pertanian tembakau, tidak lepas adanya fungsi lahan. Fungsi lahan dalam arti media tanam (*soil*) dan ruang (*space*) sangatlah kompleks. Pada saat manusia mengenal usaha tani, fungsi lahan tidak hanya untuk bercocok tanam secara subsisten saja. Tetapi, fungsi lahan untuk membentuk adanya struktur sosial petani, kebudayaan petani, dan sebagai media modifikasi energi antara sistem sosial petani dengan ekosistem pertaniannya (Singgih, 1999:1).

Pentingnya fungsi lahan untuk menjalin hubungan sosial yang berlandaskan moralitas. Dalam kehidupan petani tembakau, moralitas menjadi ukuran baik atau buruknya perilaku petani. Hal tersebut terjadi karena adanya komersialisai pertanian yang menyebabkan perubahan hubungan sosial di kalangan petani. Akibatnya, posisi petani pemilik lahan semakin kuat dan posisi buruh tani semakin lemah.

Dalam memahami masyarakat petani tembakau di Desa Kalisat, tidak dapat dilepaskan untuk memahami institusi atau lembaga sosial yang ada di masyarakat. Institusi sosial petani tembakau timbul karena adanya kebutuhan manusia yang bersifat normatif yang harus dipenuhi. Lembaga sosial merupakan sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada serangkaian aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan yang khusus pada masyarakat (Koentjaraningrat, dalam Murdiyanto, 2008:118).

Kebutuhan khusus yang ada di masyarakat petani tembakau di Desa Kalisat seperti kebutuhan berteman, bekerjasama, dan pengembangan produktifitas tanaman tembakau. Lembaga sosial pertanian Desa Kalisat berfungsi sebagai pemberi pedoman, menjaga keutuhan serta memberikan pegangan kepada masyarakat petani yang bertujuan sebagai kendali sosial. Kendali sosial tersebut sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat petani Desa Kalisat.

Pertanian tembakau di Desa Kalisat tidak lepas dari peran pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Jember maupun pemerintah Desa Kalisat. Pemerintah daerah berperan sebagai pembinaan, pemantauan dan pengawasan perusahaan tembakau dalam sistem perkebunan tembakau di Kabupaten Jember. Pemerintah

Kabupaten Jember mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pengusahaan Tembakau. Perda tersebut dikeluarkan dengan tujuan mensejahterakan seluruh pelaku dalam pengusahaan tembakau mulai dari petani, pedagang, dan pengusaha atau eskportir.

Selain itu, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pengusahaan Tembakau BAB III tentang perijinan dan pengelolaan pasal 9 pemerintah kabupaten berperan dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pengusahaan tembakau. Pembinaan dilakukan kepada petani dan perusahaan dalam proses penanaman sampai panen tembakau. Pemantauan dan pengawasan dilakukan dalam hal tataniaga antara pelaku pengusahaan tembakau. Pengusahaan tembakau melibatkan perusahaan tembakau, perusahaan sebagai pengusahaan tembakau yang meliputi budidaya tembakau, pembelian dan pengolahan tembakau. Perusahaan sebagai pengelola atau pembeli hasil tembakau yang dihasilkan oleh petani.

Petani yang mengikuti program kemitraan atau disebut petani mitra akan memperoleh bibit tembakau, pupuk serta obat dari perusahaan mitra. Petani mitra harus mengikuti program kemitraan untuk mematuhi cara penanaman dan mengelola tembakau dari penyuluh lapangan perusahaan mitra (Pradita, 2014: 5). Tembakau yang dihasilkan oleh petani tembakau sepenuhnya dijual ke perusahaan mitra dan penjuala sesuai dengan harga yang ditentukan perusahaan mitra dan diawasi oleh pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

Martodireso, S dan Suryanto, W.A (dalam Latifah, H. N., 2010 : 16), kemitraan usaha pertanian merupakan instrumen bentuk kerja sama yang bertujuan agar terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan, dan keterampilan yang didasari oleh rasa percaya antara perusahaan dan petani mitra sebagai perwujudan sinergi kemitraan, yaitu terwujudnya hubungan saling membutuhkan, menguntungkan, dan memperkuat. Hubungan kemitraan tersebut yang terjalin antara perusahaan mitra dan petani mitra dalam pengelolaan perkebunan tembakau.

Pada realitasnya, pemberian bibit tembakau, pupuk serta obat dari perusahaan mitra tidak diberikan secara gratis. Pemberian bibit tembakau, pupuk serta obat dari perusahaan mitra dianggap sebagai kesepakatan dan pemberian modal awal, setelah panen dilaksanakan hasil penjualan akan dipotong dengan jumlah pemberian modal awal dari perusahaan.

Petani mitra merupakan institusi atau lembaga baru yang ada di Desa Kalisat dalam pertanian tembakau. Institusi tersebut merupakan alat dalam pemenuhan kebutuhan yang disepakati secara bersama yang kemudian menjadi suatu lembaga sosial.

Perkembangan pengusahaan tembakau tidak lepas dari petani tembakau sebagai pembudidaya tanaman tembakau. Petani tembakau berusaha mengembangkan pengusahaan tembakaunya dengan modal sosial yang mereka miliki. Modal sosial tersebut merupakan komponen dalam pencapaian tujuan bersama yang saling menggerakkan dan saling percaya dalam pengusahaan tembakau. Putnam mendefinisikan modal sosial yang mengacu pada ciri-ciri

organisasi sosial, seperti jaringan sosial, norma-norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi kordinasi yang manfaatnya bisa dirasakan bersama.

Pemanfaatan modal sosial ini bagi peneliti dapat memenuhi kelangkaan sumber daya yang dimiliki petani tembakau yang terjadi karena harga pasar yang tidak menentu dan tingkat pendidikan petani tembakau yang berpendidikan SMP ke bawah. Dengan adanya kelembagaan pertanian mitra perusahaan petani tembakau dapat memanfaatkan modal sosial mereka untuk mencapai tujuan mereka ditengan krisis sumber daya yang mereka miliki. Pemanfaatan modal sosial ini dapat dilakukan dengan menjalin relasi antar petani tembakau. lembaga pertanian mitra tembakau menjadi bentuk organisasi sosial yang digunakan oleh petani tembakau untuk menciptakan modal sosial mereka, sehingga dapat digunakan dalam pencapaian tujuan mereka.

Dengan adanya lembaga sosial baru atau institusi baru yaitu petani mitra, menumbuhkan adanya modal sosial untuk bekerja sama dalam mengembangkan pengusahaan tembakau. Pengusahaan tembakau dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan bersama yang berhubungan melalui jaringan-jaringan sosial, serta memiliki nilai dan norma dalam jaringan tersebut.

Terkait dengan permasalahan tersebut, peneliti tertarik ingin meneliti bagaimana modal sosial dalam kemitraan pertanian tembakau antara petani tembakau dan Perusahaan Tembakau setelah adanya Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 Di Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modal sosial dalam kemitraan pertanian tembakau antara petani tembakau dan Perusahaan Tembakau setelah adanya Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 Di Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis modal sosial dalam kemitraan pertanian tembakau antara petani tembakau dan Perusahaan Tembakau setelah adanya Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 Di Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah penelitian mengenai kemitraan pertanian tembakau antara petani tembakau dan perusahaan tembakau dengan menggunakan modal sosial serta dalam sosiologi pedesaan.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pembaca dalam mengetahui kemitraan pertanian tembakau antara petani tembakau dan perusahaan tembakau dengan modal sosial yang ada di dalamnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai kelembagaan dan modal sosial memang telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan para praktisi. Namun dari sekian banyak penelitian mengenai kelembagaan dan modal sosial, mayoritas penelitian membicarakan mengenai kesejahteraan, pengembangan organisasi, serta peningkatan produktifitas sumberdaya. Selanjutnya, penelitian yang akan penulis lakukan mengenai kemitraan petani tembakau dan Perusahaan Tembakau setelah adanya Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 dengan analisis modal sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsiar Amin (2016) yang berjudul pengaruh unsur modal sosial terhadap keberhasilan kelompok tani-ternak Penerima Bantuan Program Sarjana Membangun Desa (SMD) Di Kabupaten Bone. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh adanya program sarjana membangun desa yang dilakukan di Kabupaten Bone melalui seleksi dan penetapan yang dilakukan oleh dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi sulawesi selatan dengan Fakultas Peternakan Universitas Sultan Hasanuddin. Pada program tersebut didapatkan bahwa adanya indikasi kelompok tani-ternak binaan program yang berada di Kecamatan Libureng dan Kecamatan Lappariaja yang mengalami pemasalahan terkait modal sosial yang mereka miliki. Disisi lain, kesejahteraan peternak yang tergabung dalam program tersebut juga mengalami penurunan (Amin, 2016:2-3).

Penelitian ini berfokus dalam pengaruh unsur modal sosial terhadap keberhasilan mencapai tujuan kelompok tani-ternak penerima bantuan Program Sarjana Membangun Desa (SMD) di Kabupaten Bone. Penelitian ini menjelaskan peningkatan pendapatan dan efisiensi ekonomi usaha ternak sapi potong menjadi suatu hal yang wajib dalam pengembangan usaha. Kebersamaan dalam kelompok peternak merupakan modal sosial yang signifikan dalam peningkatan output kelompok dan individu secara teknis dan ekonomi (Amin, 2016:5). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan menggunakan *likert*. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah anggota dari penerima Bantuan Progra Sarjana Membangun Desa (SMD).

Hasil dari penelitian ini adalah unsur modal sosial (*trust*, *network*, *reciprocity*, dan *norm*) dan keberhasilan kelompok tani-ternak penerima bantuan Program Sarjana Membangun Desa (SMD) tergolong dalam kategori sedang. Unsur modal sosial (*trust*, *network*, *reciprocity*, dan *norm*) berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan kelompok tani-ternak penerima bantuan Program Sarjana Membangun Desa (SMD) dengan presentase sebesar 88,6%.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Kunto Widodo (2015) dengan judul analisis pengaruh modal sosial terhadap produktivitas lahan jagung. Penelitian tersebut dilatarbelakangi masyarakat pedesaan Kabupaten Grobogan yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Pada kenyataannya di Kabupaten Grobogan, sektor pertanian sebagian besar masih dalam skala yang kecil. Peran kelembagaan pertanian sangat berperan penting dalam membantu petani keluar dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, di Kabupaten Grobogan

tingkat modal sosialnya tinggi dan memiliki peran dalam melancarkan aktivitas ekonomi yang dapat dilihat dalam proses produksi, distribusi, dan inovasi hasil pertanian (Widodo, 2015:6-9).

Fokus pada penelitian yang dilakukan Widodo (2015) yaitu, pengaruh modal sosial terhadap produktivitas lahan jagung. Modal sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah modal sosial yang dimiliki individu mengacu pada aktivitas kooperatif. Acuan yang dilakukan dalam perilaku tersebut pada jaringan sosial, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang ada di dalam organisasi yang menjembatani adanya kerjasama yang saling menguntungkan untuk mendorong adanya keteraturan serta peningkatan kesejahteraan di dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.

Hasil dari penelitian penelitian ini menunjukkan variabel modal sosial dapat mengakselerasi produktivitas lahan jagung secara positif walaupun tetapi tidak secara signifikan. Komponen modal sosial yang sangat berpengaruh adalah keaktifan petani dalam kelompok tani dalam interaksinya dengan penyuluh. Petani yang berada di luar anggota kelompok tani memiliki produktifitas lahan jagung lebih tinggi daripada dengan petani yang menjadi anggota kelompok tani.

Penelitian terdahulu ketiga adalah penelitian dari Adhitya Wardhono (2009) yang merupakan salah satu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Penelitian tersebut berjudul transformasi kelembagaan kepemilikan tanah Desa Klompangan Kabupaten Jember. Penelitian tersebut dilatar belakangi dilema terbesar di pedesaan jawa yang pola tranformasi kelembagaan yang berjalan tanpa antisipasi ketat dan berjalan sendiri tanpa arah secara natural. Hal tersebut paling

tidak terlihat dalam pola kelembagaan ekonomi tradisional yang rapuh dalam melakukan jaringan kerjasama dengan kelembagaan modern, serta rendahnya kapasitas internal dengan stagnannya daya saing ekonomi yang dimiliki. Salah satu transformasi kelembagaan yang urgen untuk mendapatkan perhatian lebih adalah perubahan kepemilikan lahan atau lahan di pedesaan. Hal tersebut mengingat bagi masyarakat desa lahan atau tanah merupakan aset ekonomi yang terpenting yang bisa menggerakkan kegiatan ekonomi (Wardhono, 2009:1).

Fokus penelitian yang dilakukan Wardhono (2009) adalah mengungkap pola perubahan kelembagaan kepemilikan tanah yang berkesinambungan dengan pembangunan daerah setempat dan bagaimana strategi untuk mengelola perubahan kelembagaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Wardhono (2009) adalah dalam transformasi institusional kepemilikan tanah di Desa Klompangan, terjadi kecenderungan transformasi pola kepemilikan tanah oleh penduduk desa akibat penetrasi UUPA/1960. Selain itu, kepemilikan lahan menjadi sempit dan sempit sehingga meremas kepemilikan karena transaksi tanah mencapai 5% dari tanah milik orang-orang di luar desa. Sementara itu, serah terima kepemilikan tanah disebabkan oleh faktor kebutuhan hidup, rendahnya posisi tawar petani dan urbanisasi. Dengan kata lain, serah terima kepemilikan tanah didorong oleh permintaan konstituen.

Penulis melihat penelitian pertama yang dilakukan oleh Syamsiar Amin (2016) memberikan hasil mengenai pengaruh unsur modal sosial (*trust, network,*

dan *norm*) bagi keberhasilan kelompok tani-ternak dengan presentase 88,6%. Modal sosial sangat berpengaruh bagi kelompok tani-ternak untuk mengembangkan kelompoknya. Unsur modal sosial dan keberhasilan kelompok tani-ternak tergolong dalam kategori sedang. Hal tersebut mengartikan bahwa unsur modal sosial telah terbentuk di dalam anggota kelompok.

Dalam penelitian yang dilakukan Amin (2016) hanya terfokus pada pengaruh modal sosial kelompok tani-ternak terhadap bantuan Program Sarjana Membangun Desa (SMD). Modal sosial hanya dilihat dalam unsur-unsurnya yaitu *trust*, *network*, dan *norm*. Berbeda dengan penulis yang melihat peran modal sosial dari Robert D. Putnam dalam perubahan tataniaga pertanian tembakau di Desa Kalisat. Penulis akan melihat bagaimana peran penting modal sosial terhadap perubahan yang terjadi di dalam tataniaga tembakau.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Kunto Widodo (2015), peneliti melihat penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2015) bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal sosial dalam produktivitas petani jagung. Peranan modal sosial sebagai penunjang kegiatan usaha tani di dalam sektor pertanian. Dari hal tersebut terlihat modal sosial sangat berperan penting dalam pengembangan sektor pertanian. Peranan kelompok sosial dalam peningkatan produktivitas sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas lahan jagung.

Selain itu, perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2015) melihat bagaimana perbedaan produktivitas antara yang berada di dalam kelompok dan di luar kelompok dengan

menggunakan teori modal sosial. Berbeda dengan yang penulis akan teliti, penulis akan meneliti perubahan relasi petani tembakau dan perusahaan di Desa Kalisat. Penulis akan melihat bagaimana modal sosial terjalin dalam relasi tataniaga kemitraan pertanian tembakau.

Kedua penelitian diatas melihat peran modal sosial sebagai peningkatan produktivitas dan pengembangan kelompoknya. Kedua penelitian diatas memberikan gambaran pada penulis bagaimana modal sosial berperan di dalam organisasi atau kelompok. Peran modal sosial sebagai penguatan dan pengembangan internal kelompok atau organisasi sosial.

Selain itu, penelitian penelitian yang dilakukan Adhitya Wardhono (2009) tentang pola perubahan kelembagaan kepemilikan tanah yang berfokus pada mengungkap pola perubahan kelembagaan kepemilikan tanah yang berkesinambungan dengan pembangunan daerah setempat dan bagaimana strategi untuk mengelola perubahan kelembagaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan Wardhono (2009) melihat perubahan kepemilikan lahan di desa kelompangan disimpulkan menjhadi beberapa poin penting. Pertama, terdapat perubahan kepemilikan tanah akibat dari penetrasi UUPA/1960. Kedua, kepemilikan lahan semakin sempit dan bergeser kepemilikannya akibat transaksi jaul beli yang luas yang dibeli oleh orang luar. Penelitian tersebut melihat adanya perubahan kelembagaan dalam kepemilikan lahan.

Perubahan kelembagaan tersebut terjadi dari kepemilikan lahan dengan sistem kepemilikan nonformal setelah dijual menjadi kepemilikan lahan secara

formal dengan menggunakan sertifikat tanah, petok C, dan akte tanah. Perubahan tersebut terjadi karena faktor kebutuhan hidup, nilai tukar petani yang rendah, dan urbanisasi.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis melihat bagaimana pengaruh perubahan kelembagaan yang berdampak pada petani tembakau. Tetapi, dengan melihat penelitian yang dilakukan oleh Wardhono (2008), penulis melihat bagaimana perubahan tataniaga tembakau setelah berlakunya Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003.



Berikut ringkasan dan perbedaan dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan:

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Syamsiar Amin (2016)	Kunto Widodo (2015)	Adhitya Wardhono (2009)	Roni Vista Ardi Candra (2017)
Judul Penelitian	Pengaruh Unsur Modal Sosial Terhadap Keberhasilan Kelompok Tani-Ternak Penerima Bantuan Program Sarjana Membangun Desa (SMD) Di Kabupaten Bone.	Analisis Pengaruh Modal Sosial Terhadap Produktivitas Lahan Jagung	Transformasi Kelembagaan Kepemilikan Tanah Desa Klompangan Kabupaten Jember	Pertanian Tembakau (Studi Tentang Relasi Antara Petani Tembakau Dan Perusahaan Tembakau Setelah Adanya Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 Di Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember)
Jenis penelitian	Kualitatif yang kemudian di kuantitatifkan	Kuantitatif	Kualitatif	Metode kualitatif, dengan pendekatan kualitatif deskriptif
Teori	Modal sosial	Modal sosial	-	Modal sosial Robert D. Putnam
Hasil Penelitian	Hasil unsur modal sosial (<i>trust, network, reciprocity, dan norm</i>) dan keberhasilan kelompok tani-ternak penerima bantuan Program Sarjana Membangun Desa (SMD) tergolong dalam kategori	Variabel modal sosial dapat mengakselerasi produktivitas lahan jagung secara positif tetapi tidak secara signifikan. Komponen modal sosial yang sangat berpengaruh	Dalam transformasi institusional kepemilikan tanah di Desa Klompangan, terjadi kecenderungan transformasi pola kepemilikan tanah oleh	perubahan tataniaga tembakau setelah berlakunya Perda Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2003 menjadi sistem kemitraan. Sistem kemitraan modal

	sedang. Unsur modal sosial (<i>trust, network, reciprocity, dan norm</i>) berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan kelompok tani-ternak Penerima Bantuan Program Sarjana Membangun Desa (SMD) dengan presentase 88,6%.	adalah aktifnya petani dalam kelompok tani dalam interaksinya dengan penyuluh. Petani yang berada di luar anggota kelompok tani memiliki produktifitas lahan jagung lebih tinggi daripada dengan petani yang menjadi anggota kelompok tani.	penduduk desa akibat penetrasi UUPA / 1960. Selain itu, kepemilikan lahan menjadi sempit dan sempit sehingga meremas kepemilikan karena transaksi tanah mencapai 5% dari tanah milik orang-orang di luar desa. Sementara itu, serah terima kepemilikan tanah disebabkan oleh faktor kebutuhan hidup, rendahnya posisi tawar petani dan urbanisasi.	sosial tersebut terus dipelihara dan terakumulasi dengan adanya kepercayaan, jaringan, dan norma. Jejaring kemitraan juga memanfaatkan <i>bonding</i> dan <i>bridging</i> . Untuk memperkuat jaringan kemitraan ditanamkan kepercayaan yang diperkuat dengan norma.
Perbedaan penelitian	Penelitian yang dilakukan Amin (2016) menekankan pada pengaruh unsur modal sosial terhadap keberhasilan mencapai tujuan kelompok tani-ternak penerima bantuan Program Sarjana Membangun Desa (SMD).	Penelitian yang dilakukan Widodo (2015) menekankan pada pengaruh modal sosial terhadap produktivitas lahan jagung. Modal sosial dalam penelitian ini merupakan modal sosial yang dimiliki individu yang mengacu pada aktivitas kooperatif.	Penelitian yang dilakukan Wardhono (2009) menekankan pada pola perubahan kelembagaan kepemilikan tanah yang beksinambungan dengan pembangunan daerah setempat dan bagaimana strategi untuk mengelola perubahan kelembagaan tersebut.	Penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan pada kemitraan petani tembakau dan Perusahaan Tembakau setelah diberlakukannya Perda Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2003.

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. Petani Tembakau

Di Indonesia, perkebunan tembakau dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1800an. Pada awalnya Pemerintah Kolonial Belanda mengenalkan rokok kretek kepada masyarakat Jawa untuk membelinya. Pada awalnya kretek dibuat dengan dibungkus “*klobot*” atau daun kawung yang diikat dengan benang. Setelah perkembangannya, kretek yang dibungkus kertas pertama kali diproduksi pada tahun 1930an oleh Nitisamito di Kudus (Gately dalam Markus, dkk., 2015 : 15).

Setelah perkembangannya, menurut Arifin (1989) tembakau masuk pertama kali pada saat Pemerintah Hindia Belanda mengadakan penetrasi sistem kapitalisnya yang berwujud perkebunan partikelir. Tetapi, sistem tanam paksa kemudia dihentikan setelah menuai banyak kritik dan dibuatkan UU Agraria 1870 serta UU Gula 1870, yang mengawali era liberalisasi ekonomi penjajahan Indonesia. Antara waktu sistem tanam paksa dan dikeluarkannya UU tersebut, pada tanggal 21 Oktober 1959 didirikan adanya Landbouw Maatscappij Oud Djember yang bergerak dibidang tembakau. Hingga saat tanaman tembakau masih ditanam dan berkembang di Desa Kalisat, Kabupaten Jember.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pengusahaan Tembakau, petani tembakau adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya mengusahakan lahan dan media tumbuh untuk budidaya tanaman tembakau. Petani tembakau di Kabupaten Jember pada mulanya membudidayakan tanaman

tembakau sesuai dengan pengalaman dan turun temurun, yang dilakukan pada waktu musim menjelang kemarau.

Padmo dan Dajtmiko (dalam Brata, 2012:123-124) menyebutkan bahwa petani di Jember merupakan petani yang “*tembakau minded*”, dikarenakan mereka rela meliburkan lahannya dari tanaman lain agar tembakau mereka pada waktunya mendapatkan tanah pada posisi yang baik untuk ditanam dan hasil yang maksimal. Hal tersebut dikarenakan petani tembakau di Jember sudah menghitung. Perhitungan tersebut dilakukan untuk membandingkan tanaman kapuk, kopi, kelapa, bahkan cengkeh, tetapi tembakau adalah tanaman yang paling menguntungkan.

2.2.2. Lembaga Sosial

Secara konseptual kelembagaan berasal dari kata institusi atau pranata yang diartikan sebagai suatu prosedur yang sudah berlaku dan mantap dalam pelaksanaannya (Mc Iver dalam Siswijono, 2008: 115). Menurut Hayami Kikuchi (1987) kelembagaan atau pranata merupakan aturan-aturan yang mengatur perilaku yang lebih dikukuhkan dengan diberlakukannya sanksi oleh anggotanya. Lebih lanjut, Hayami dan Kikuchi menyatakan bahwa terdapat banyak pengertian tentang kelembagaan, namun secara umum kelembagaan dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang dianut oleh kelompok sosial atau organisasi atau masyarakat yang digunakan sebagai pedoman dan pegangan oleh seluruh anggota kelompok sosial atau anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam mengadakan transisi dengan yang lain.

Kelembagaan atau pranata ini berbeda dengan organisasi, perbedaan tersebut terletak pada tujuan pengaturan, organisasi berorientasi pada pengaturan

tujuan. Tetapi, apabila pengaturan tersebut terkait dengan pemenuhan kebutuhan, baik pemenuhan kebutuhan dasar maupun pemenuhan kebutuhan sekunder, maka pengaturan tersebut terkait dengan masalah kelembagaan. Kelembagaan muncul dan tumbuh dalam masyarakat secara evolusi dari masyarakat sebagai suatu upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan dalam pemecahan persoalan yang ada dalam masyarakat melalui nilai-nilai yang mengatur perilaku, kelembagaan ini disebut kelembagaan non formal. Sedangkan kelembagaan yang muncul karena disengaja karena terdapat peraturan-peraturan atau perundang-undangan lembaga tersebut disebut sebagai lembaga formal (Siswijono, dkk, 2008:116). Kelembagaan berkembang sesuai dengan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Menurut Gunawan, dkk (dalam Siswijono, 2008:116) pada dasarnya setiap bentuk kelembagaan mengatur dalam tiga hal yang utama yaitu pengaturan terhadap penguasaan, pengaturan dalam pemanfaatan, serta pengaturan dalam pendistribusian sumberdaya. Bentuk-bentuk pengaturan tersebut dimisalkan dalam pengaturan dalam kepemilikan atau penguasaan atas aset sumberdaya, pengaturan terhadap pemberian insentif kepada pembudidaya atau pengelola sumberdaya, pengaturan terhadap biaya transaksi, pengaturan untuk menikmati hasil dalam mengelola sumberdaya, dan pengaturan pada pemberian upah atau ongkos sosial serta pengaturan yang lainnya.

Kerja dari suatu kelembagaan secara normatif bisa berdampak baik maupun berdampak buruk. Kinerja yang berdampak baik misalkan kelembagaan koperasi, kemitraan, dan lembaga pemasaran serta yang lainnya. Pada

kelembagaan kerjasama kemitraan ini seorang petani tidak memiliki modal untuk usaha, mereka bisa memilih usaha, karena mereka diberi kepercayaan untuk mengelola modal orang lain atau usaha orang lain. Sedangkan kinerja kelembagaan yang bersifat buruk adalah kelembagaan yang bersifat bagi hasil. Menurut Siahaan (dalam Siswijono, 2008:116) sistem bagi hasil merupakan bentuk pengusahaan pertanian yang tidak bersifat statis. Sistem bagi hasil ini secara drastis telah berubah sistem yang awalnya sebagai sistem yang mempertahankan harmoni sosial menjadi sistem hubungan komersial rasional.

Pada pokoknya kelembagaan dibangun sebagai suatu aturan main untuk mengatur pelaku ekonomi dalam suatu masyarakat, sebagai akibat adanya perubahan perilaku manusia yang berada diluar kendali karena pada kondisi dan pengetahuan yang dimilikinya sebagai dampak dari perubahan ekonomi. Menurut Hayami dan Kikuchi (1987) kelembagaan sebagai pedoman lebih mudah dilaksanakan dalam masyarakat dengan struktur terpadu dan ketat. Individu diharapkan dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku, seperti hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik yang telah diatur oleh tradisi. Sedangkan dalam sistem sosial yang berstruktur longgar, tingkah laku individu bersifat individualis serta mudah bagi individu untuk menyelamatkan dirinya ketika telah berbuat sesuatu yang menyimpang bagi masyarakat.

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Modal Sosial

Modal sosial muncul sebagai sebuah respon dari kondisi meregangnya hubungan antar manusia dan semakin adanya ketidak pedulian antar manusia.

Modal sosial sangat beragam dan pada umumnya dirumuskan berdasarkan masalah-masalah sosial tertentu dimana modal sosial sebagai salah satu faktor pendukung kemajuan ekonomi (Ahmadi, dalam Sasongko, 2013:54). Modal sosial membangun hubungan dengan sesama, dan menjaganya agar berlangsung dalam waktu yang lama. Orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai hal tidak dapat dilakukannya sendiri, atau dapat dicapai tetapi dengan susah payah. Manusia berhubungan melalui jaringan dan mereka memiliki kecenderungan nilai yang sama dengan anggota lain dalam jaringan tersebut, sejauh jejaring sosial menjadi sumber daya, dapat dipandang sebagai modal (Field, 2010:1). Modal sosial sendiri memiliki banyak definisi yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh. Coleman (1988:98) dalam Kimbal (2015:21), mendefinisikan modal sosial sebagai,

Variety of different entities, with two elements in common: they all consist of some aspect of sosial structure, and they facilitate certain actions of actors whether personal or corporate actors within the structure.

(Modal sosial memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut.)

Fukuyama (1999:16) dalam Kimbal (2015:21) mengartikan modal sosial

Modal sosial merupakan serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara anggota kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya suatu bentuk kerjasama antar mereka.

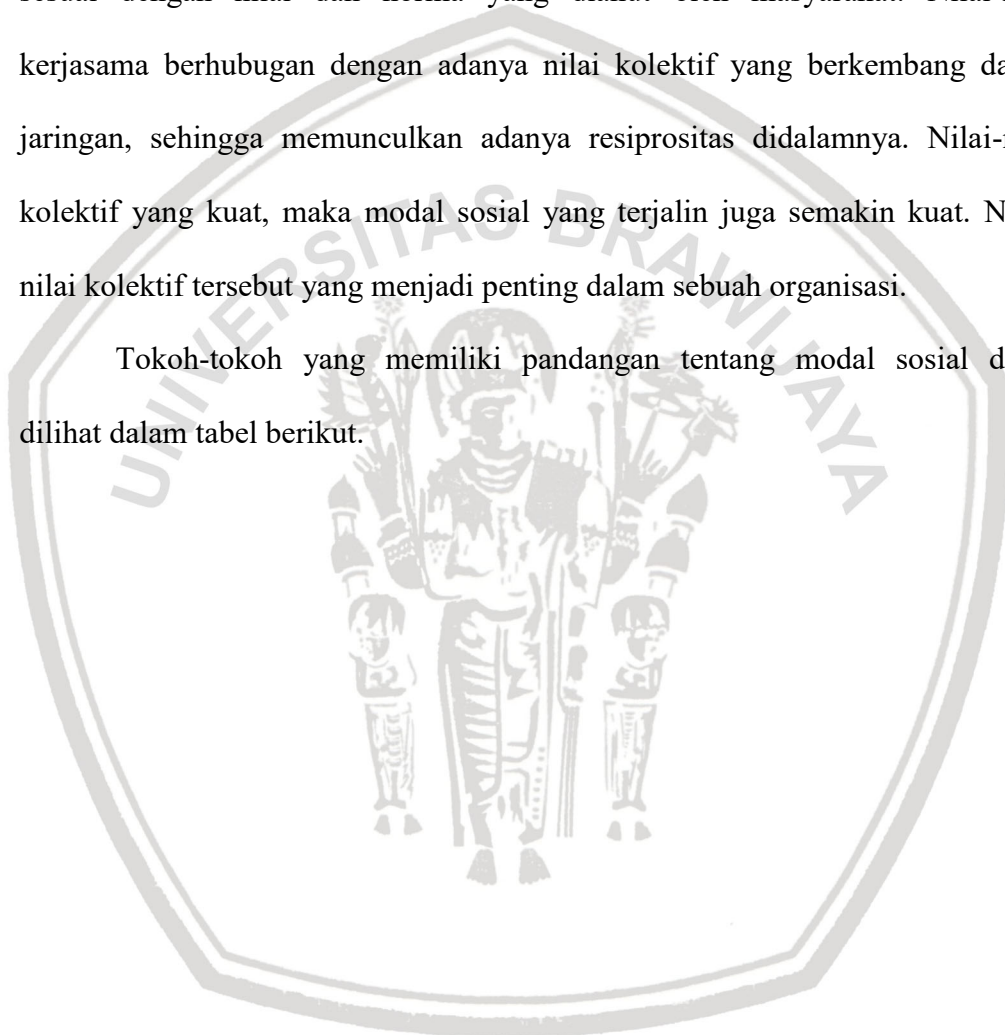
Putnam (1993:36) dalam Kimbal (2015:21) yang mengartikan modal sosial sebagai

To the nations of physical and human capital, to term sosial capital refers to featur of sosial organization such as network, norms, and

trust that increase a society's structure that facilitate certain actions of actors within the structure.

Modal sosial dalam pengertian merupakan suatu jaringan kelompok yang bekerjasama secara sistematis yang bekerja dalam cara yang relatif teratur dan sesuai dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai kerjasama berhubungan dengan adanya nilai kolektif yang berkembang dalam jaringan, sehingga memunculkan adanya resiprositas didalamnya. Nilai-nilai kolektif yang kuat, maka modal sosial yang terjalin juga semakin kuat. Nilai-nilai kolektif tersebut yang menjadi penting dalam sebuah organisasi.

Tokoh-tokoh yang memiliki pandangan tentang modal sosial dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel 2. Teori Kapital Sosial

	The Clasical Capital Theory	The Neo – Capital Theoris			
		Human Capital	Cultural Capital	Sosial Capital	
Theorist	Marx	Schultz, Becker	Bourdieu	Lin, Burt, Marsden, Flap, Coleman	Bourdieu, Coleman, Putnam
Explanation	Sosial relation: Exploitation by the Capitalist (Bourgeoise) of the ploretariat	Accumulatio n of surplus value by laborer	Reproduction of dominant symbols and meaning (values)	Acces to and use of resources embedded in sosial networks	Solidarity and reproduction of group
Capital	A. Part of surplus value between the use value (in consumption market) an the exchange value (in production-labor market) of the commoditiy. B. Investment in the production and circulation of commodities	Invesment in technical skills and knowledge	Internationali zation or misrecognitio n of dominant values	Invesment in sosial networks	Invesment in mutual recognition and acknowladme nt
Level of Analysis	Structural (classes)	Individual	Individual/ class	Individual	Group/ individual

Sumber : Lin,1999:30

Dalam tabel diatas, setiap tokoh dalam pemikiran tentang modal sosial berbeda dalam sudut pandang. Pada pemikiran Coleman, Bordieu, dan Putnam berfokus pada organisasi yang di dalam organisasi tersebut harus memiliki

solidaritas yang berkelanjutan. Pemikiran Putnam tentang modal sosial akan menjadi alat analisis dalam penelitian ini. Putnam dalam tabel diatas menjelaskan analisisnya yang dilakukan dalam grup atau individu yang tidak lepas dalam meletakkan jaringan, kepercayaan, dan norma untuk melihat keberadaan modal sosial dalam suatu kelompok masyarakat.

Putnam (dalam Field, 2016:33) membagi modal sosial menjadi dua bentuk yang bertujuan untuk mempermudah dalam unit analisis. Pembagian bentuk yaitu:

1. *Bonding Social Kapital* (modal sosial yang mengikat), modal sosial ini merupakan ikatan antar orang yang berada dalam situasi yang sama, seperti keluarga, sahabat, dan tetangga.
2. *Bridge Social Capital* (modal sosial yang menjembatani), merupakan modal sosial yang mencakup sebuah ikatan yang lebih longgar dari beberapa orang, seperti contohnya rekan kerja.

2.3.2. Unsur-Unsur Modal Sosial

1. Kepercayaan

Merujuk pada tulisan Lawang (dalam Sasongko, 2013:55), definisi *trust* dalam bahasa inggris merupakan bentuk kata kerja dan kata benda. Kepercayaan, keyakinan, dan juga rasa percaya merupakan arti kata *trust* sebagai kata benda. Sebagai kata kerja, *trust* berarti sebagai sebuah proses mempercayai sesuatu yang jelas sasarannya. Putnam mendefinisikan kepercayaan sebagai suatu perasaan yakin bahwa orang lain dalam melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan berperan dalam pola peran yang saling mendukung dan tidak ada tujuan saling merugikan bagi individu atau kelompok (Putnam, 2000:19).

Putnam memaparkan bahwa pemberian dan pengakuan merupakan suatu investasi sosial untuk memperoleh suatu kepercayaan.

Lawang (dalam Sasongko, 2013:55) menyatakan bahwa kepercayaan antar manusia terdapat tiga hal penting yang saling keterkaitan. Ketiga hal tersebut yaitu, hubungan sosial, harapan, dan tindakan sosial atau interaksi sosial. Berdasarkan tiga hal yang mendasar tersebut kepercayaan yang dimaksud menunjukkan pada hubungan antara kedua belah pihak atau lebih yang mengandung harapan yang saling menguntungkan salah satu atau kedua belah pihak atau lebih melalui interaksi sosial. Sebagai konstruksi sosial sosial historis empirik, kepercayaan tidak dapat terbentuk melalui proses satu kali, melainkan dibangun atas pengalaman, akumulatif, harapan yang teruji, penghargaan dan keuntungan yang terbangun di dalamnya. Oleh karena itu, kepercayaan dibangun secara terus menerus.

Kepercayaan (*trust*) merupakan hal yang menjadi pondasi dalam penelitian ini. Kepercayaan menjadi penting dalam hubungan kelembagaan kemitraan yang ada di dalam petani tembakau. Dalam kepercayaan yang ada di dalam kelembagaan kemitraan petani tembakau terdapat harapan, interaksi sosial, dan hubungan sosial. Kepercayaan yang terbangun karena petani tembakau memiliki nilai dan tujuan yang sama untuk menciptakan keadaan yang lebih baik.

2. Jaringan

Jaringan merupakan insfrastruktur dinamis dari modal sosial yang terwujud dalam jaringan kerjasama antar manusia (Putnam 1995:76). Di dalam

jaringan terdapat suatu interaksi sosial yang terjadi antar manusia yang menumbuhkan adanya kolektifitas untuk tujuan menyelesaikan masalah secara kolektif. Dengan adanya jaringan individu lebih mudah mengakses berbagai informasi yang ingin diperoleh, serta lebih mudah dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, dalam mencapai tujuan dengan adanya jaringan dapat mencapai tujuan tersebut dengan lebih mudah dan cepat.

Sasongko (2013:55), dalam modal sosial arti jaringan dapat dijelaskan berdasarkan empat hal,

- a. Adanya ikatan antar simpul (orang atau kelompok) yang hubungannya dihubungkan dengan media hubungan sosial. Hubungan sosial tersebut diikat oleh kepercayaan, dan kepercayaan tersebut diikat oleh norma-norma yang berlaku dan mengikat kedua belah pihak.
- b. Ada kerja antar simpul (orang atau kelompok), adanya hubungan sosial sehingga membentuk suatu kerjasama.
- c. Di dalam jaringan tidak ada ikatan simpul (orang atau kelompok) yang dapat berdiri sendiri. Apabila salah satu simpul terputus, maka jaringan yang terbangun tidak dapat berfungsi. Seluruh simpul menjadi satu kesatuan yang kuat serta adanya hubungan yang tidak dapat dipisahkan.
- d. Ikatan atau pegikat dalam modal sosial adalah norma. Norma tersebut mengatur dan mengikat sehingga menjaga ikatan dan tetap terpelihara.

Dalam petani tembakau di Desa Kalisat tentunya tidak lepas dari adanya sebuah jaringan. Jaringan tersebut ada untuk mencapai tujuan bersama. Jaringan tersebut untuk memperoleh informasi tentang perkembangan tanaman tembakau

di daerah lain. Jaringan yang ada dalam kemitraan petani tembakau tidak lepas dari kepercayaan yang dibangun oleh antar pihak yang saling bekerjasama yang menimbulkan hubungan timbal balik. Jaringan yang terbentuk antar pihak tersebut dengan tujuan tidak merugikan dan saling menguntungkan antar pihak yang berjaringan.

3. Norma

Norma merupakan suatu pengikat dalam modal sosial. Norma-norma sosial merupakan seperangkat aturan tertulis maupun tidak tertulis. Norma tersebut mengatur dan menjaga bagaimana ikatan dan medianya tetap dipelihara dan selalu dipertahankan. Norma muncul ketika dalam kelompok terdapat suatu jaringan dan kepercayaan. Norma tidak lepas dengan sanksi untuk mengikat anggotanya. Sanksi tersebut diberikan ketika terdapat penyimpangan dan pelanggaran yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Menurut Putnam (2000:35) norma-norma dibangun dan dikembangkan berdasarkan kerjasama, pertukaran sosial, saling percaya, dan terbentuknya suatu nilai dan norma yang ada dalam hubungan interaksi tersebut.

Di dalam kelembagaan kemitraan pertanian tembakau tidak lepas adanya norma. Norma yang ada di dalam kelembagaan kemitraan pertanian tembakau bertujuan mengikat sehingga kepercayaan dan jaringan menjadi lebih kuat. Dengan kondisi tersebut dalam mencapai tujuan tersebut menjadi lebih mudah dan efisien.

Bagan 1. Kerangka Berpikir Penelitian



Tataniaga sebelum berlakunya Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 tentang pengusahaan tembakau sangat panjang dan bertingkat, sehingga actor yang terlibat banyak. Tataniaga yang panjang cenderung menempatkan petani dalam posisi yang tidak diuntungkan, karena pabrik tidak bersedia membeli langsung ke petani tembakau. Hal tersebut membuat posisi *bandol* (tengkulak) berada posisi yang sentral. *Bandol* juga memiliki akses eksklusif terhadap pabrik.

Dari kerangka berpikir diatas dapat dijelaskan bahwa unit analisis dalam penelitian ini adalah tataniaga pertanian tembakau setelah berlakunya Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003. Tataniaga tersebut bersifat kemitraan yang membuat perusahaan langsung membeli tembakaunya ke petani tembakau. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah modal sosial milik Putnam, yang di dalamnya terdapat tiga asper yaitu kepercayaan, jaringan, dan norma. Ketiga parameter tersebut akan dijabarkan dengan keadaan yang ada di lapangan.

Peneliti dalam penelitian ini melihat modal sosial yang terjalin dalam sistem kemitraan pertanian tembakau. Dalam modal sosial, Putnam menyatakan ada dua tipologi modal sosial yaitu *bonding* dan *bridging*. *Bonding* dalam penelitian ini mengikat antar orang dalam situasi yang sama, dimana dalam hal ini yaitu petani mitra itu sendiri. Sedangkan *bridging* mencakup ikatan yang lebih longgar dari beberapa orang atau pelaku. *Bridging* dalam hal ini adanya jaringan dengan perusahaan tembakau dan pemerintah daerah sebagai pengawas dalam terlaksananya kemitraan pertanian tembakau. Tataniaga tembakau dengan

sistem kemitraan tidak lepas dari adanya modal sosial di dalamnya dengan tujuan pengembangan sistem kemitraan dan lebih mensejahterakan petani tembakau.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang memulai tahapan kerja melalui logika induktif (Creswell, 2015: 32). Penelitian metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dan menghasilkan prosedur analisis berupa kata-kata, gambaran, kalimat, dan pernyataan yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2005:5). Penelitian dengan metode kualitatif ini juga bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian yang mencakup perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik (Moleong, 2005: 6).

Hal tersebut dikarenakan penelitian yang dilakukan dengan model kualitatif diawali dengan asumsi, kemudian lensa penafsiran atau teoritis, dan studi mengenai permasalahan riset yang meneliti bagaimana individu atau kelompok memaknai serta menyikapi permasalahan sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2015: 87). Penelitian yang menggunakan metode kualitatif diharapkan dapat mengulas fenomena yang sudah terbingkai dalam fokus penelitian secara mendalam sehingga dapat ditemui realitas yang sesuai situasi dan kondisi yang ada di lapangan yang dijadikan ranah penelitian.

Metode kualitatif memiliki sifat yang digunakan dalam meneliti yaitu deskriptif. Deskriptif tersebut merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digunakan dalam menginterpretasi data yang didapatkan. Kualitatif deskriptif ini

digunakan karena peneliti memiliki kesempatan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai keadaan dari objek yang diteliti (Sugiyono, 2010:17). Jenis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan kondisi di lapangan yang meliputi berbagai proses yang telah terjadi dan berlangsung dengan cara diagnosa dan menerangkan berbagai hubungan yang terjadi dengan kajian teori untuk kemudian dapat ditemui kesimpulan dari masalah yang ada pada saat ini. Keseluruhan tersebut disusun secara sistematis berdasarkan data-data yang telah terkumpul (Moleong, 2004:11).

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat dan menganalisis serta menginterpretasikan kondisi yang terjadi pada saat ini. Dengan kata lain, jenis penelitian ini bertujuan memperoleh informasi serta data dengan keadaan yang ada dan dirancang untuk mengumpulkan informasi faktual yang sedang terjadi. Pada dasarnya, penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diselidiki atau diteliti (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian yang ingin diperoleh dan bukan untuk menguji sebuah hipotesis. Tetapi, peneliti berusaha memperoleh sebuah gambaran dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana modal sosial yang ada di dalam relasi petani tembakau dengan Perusahaan Tembakau. Dalam mendalami fenomena tersebut, peneliti berusaha

mendeskripsikan, mencatat, serta menginterpretasikan. Hasil dari interpretasi tersebut akan ditarik oleh peneliti untuk menarik sebuah kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian yang tidak memiliki fokus penelitian, maka penelitian tersebut akan sulit dijalankan dan hasilnya kabur dan tidak jelas. Dari hal tersebut, penting untuk peneliti membuat batasan dalam penelitian agar terfokus dan memiliki tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terkait modal sosial dalam relasi petani tembakau dan Perusahaan Tembakau di Desa Kalisat peneliti membuat batasan penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu membantu memberikan gambaran serta penjelasan terkait relasi petani tembakau dan Perusahaan Tembakau setelah diberlakukannya Perda Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2003. Selain itu, dalam penelitian ini melihat modal sosial yang terjalin antara petani tembakau dengan perusahaan tembakau dalam lembaga kemitraan pertanian tembakau.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Desa Kalisat tersebut merupakan penghasil tembakau terbesar di Kabupaten Jember. Dimana di lokasi tersebut mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani tembakau. Pilihan profesi petani tembakau tidak lepas dari tingkat pendidikan yang masih rendah. Tingkat pendidikan di Desa Kalisat mayoritas tamatan SD sampai SMP di usia produktif.

Di Desa Kalisat juga terdapat perusahaan tembakau yang mengelola tembakau menjadi produk jadi maupaun mengeksport daun tembakau. Perusahaan tembakau di Desa Kalisat seharusnya bersaing secara serentak dalam waktu yang sama untuk memperebutkan tembakau dari petani yang mengakibatkan harga jual tembakau yang naik. Tetapi, perusahaan di Desa Kalisat saat ini membeli secara bergantian sesuai kebutuhan. Hal tersebut mengakibatkan harga yang lamban untuk bergerak mengikuti kualitas tembakau yang mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan petani tembakau di Desa Kalisat.

3.4. Teknik Penentuan Informan

Karakter metode kualitatif yang lebih investigatif maka penentuan pengambilan informan yang nantinya akan dijadikan sumber pengumpulan data ditekankan pada kualitas informan bukan kepada jumlah atau kuantitas informan. Menurut Salim (2006: 12) prosedur pengambilan informan secara umum dalam penelitian kualitatif memiliki karakter diarahkan kepada kekhususan atau spesifikasi kasus yang sesuai dengan fokus penelitian, tidak dilakukan secara kaku melainkan lebih fleksibel sesuai dengan perkembangan kebutuhan selama proses studi, dan tidak diarahkan pada keterwakilan atau representasi melainkan pada kecocokan konteks. Kemudian penentuan narasumber yang dijadikan informan pada penelitian ini menggunakan *purposive*.

Penentuan informan dengan *purposive* digunakan karena peneliti berusaha memilih individu atau tempat untuk diteliti untuk tujuan memberikan pemahaman tentang masalah sosial yang diteliti dan fenomena dalam studi

tersebut secara spesifik (Creswell, 2014: 217). Dengan model penentuan informan menggunakan model *purposive* dapat memperoleh pemahaman yang spesifik dan penjelasan fenomena secara sentral (Creswell, 2014: 418). Alasan teknis pengambilan informan secara *purposive* dalam penelitian ini adalah peneliti memilih fokus untuk meneliti pada masyarakat petani tembakau di Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, sehingga penulis bertujuan untuk mencari informasi dari subjek yang memiliki peran dan terlibat dalam pengelolaan tanaman tembakau.

Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu membuat kriteria-kriteria bagi informan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Sehingga, hanya pelaku-pelaku yang memenuhi syarat yang akan dijadikan informan. Dengan begitu, hal ini akan lebih memudahkan peneliti dalam mengambil data serta lebih memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi sosial yang diteliti. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah petani tembakau yang terlibat dalam kemitraan pertanian tembakau dengan Perusahaan Tembakau dan pegawai perusahaan Perusahaan Tembakau bidang kemitraan dengan petani. Hal tersebut menjadi bahan pertimbangan karena ada petani tembakau yang tidak bermitra dan menjadi mitra perusahaan lain, sehingga tidak relevan dengan penelitian ini.

Berikut beberapa informan yang telah dipilih oleh peneliti untuk membantu dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini.

Tabel 3. Daftar Nama Informan

No.	Nama Informan	Peran Dalam Pertanian Tembakau
1.	Pak Anwar	Petani mitra
2.	Pak Bambang	Petani mitra

3.	Pak Condro	Petani mitra
4.	Pak Darto	Perusahaan
5.	Pak Suherma	Petani mitra
6.	Pak Wiwin	Petani mitra

Sumber: hasil observasi peneliti

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan fenomena yang ada di lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

3.5.1. Observasi

Observasi merupakan langkah awal peneliti untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya pada lokasi penelitian. Metode ini dilakukan sebelum hingga mendapatkan fokus penelitian untuk dikaji. Observasi berguna dalam pemetaan segala fenomena yang ada di lapangan sehingga menemukan titik permasalahan. Dengan observasi peneliti melihat dan mengamati perilaku dan keadaan yang sebenarnya di lapangan, sehingga peneliti dapat mengamati situasi-situasi yang rumit (Moleong, 2013: 174).

Dalam hal ini, peneliti tidak terlibat langsung ke dalam aktivitas yang dilakukan masyarakat mengenai pertanian tembakau tetapi peneliti hanya melihat aktifitas yang dilakukan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengamati aktifitas pertanian tembakau dengan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Sebagaimana dijelaskan diatas, peneliti mengamati kegiatan dalam kemitraan pertanian tembakau, harapannya akan memberikan gambaran yang jelas terkait fenomena yang sedang terjadi. Khususnya, terkait dengan relasi petani tembakau dan Perusahaan Tembakau dalam kemitraan pertanian tembakau.

3.5.2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab peneliti kepada informan. Wawancara memiliki fungsi untuk memperkuat data yang diperoleh pada saat melakukan observasi. Peneliti menggunakan wawancara dengan wawancara semi-terstruktur. Wawancara terstruktur memiliki ciri adanya pertanyaan terbuka namun tidak melupakan batasan tema dan alur pembicaraan, pertanyaan yang bersifat fleksibel tetapi tetap terkontrol, serta wawancara memiliki pedoman yang dijadikan alur wawancara (Herdiansyah, 2011). Melalui wawancara semi-terstruktur peneliti dapat memprediksi kecepatan dalam mewawancarai informan sebagai pertimbangan waktu. Peneliti menggunakan *guide interview* sebagai panduan dalam mengajukan pertanyaan kepada informan.

Peneliti dalam penelitian ini menyiapkan guide interview untuk menjaga wawancara agar tetap terfokus sesuai dengan data yang ingin diperoleh peneliti. Guide interview terkait dengan tataniaga tembakau, kemitraan pertanian tembakau, modal sosial yang ada di dalam kemitraan pertanian tembakau. Wawancara dilakukan pada informan yang telah ditentukan dan melakukan wawancara di rumah informan atau tempat yang telah disepakati sebelumnya. Tetapi, tidak menutup kemungkinan ada informasi dari luar panduan wawancara akan di telusuri oleh peneliti jika masih relevan dengan penelitian ini.

3.5.3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan pada penelitian ini dengan tujuan memperkaya data dan informasi. Data dan informasi yang diambil adalah data dan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, peneliti

menggunakan alat perakam untuk menyimpan hasil wawancara dengan informan untuk meminimalisir resiko peneliti kehilangan data atau informasi yang disampaikan oleh informan karena keterbatasan dari peneliti dalam mengingat hasil wawancara. Selain dokumentasi wawancara, dokumentasi penelitian juga berupa gambar-gambar yang ada di lokasi penelitian untuk mendukung data sebagai penguat fenomena yang terjadi.

3.6. Jenis Dan Sumber Data

Setelah menjabarkan teknik pengumpulan data, maka jenis data yang digunakan dapat ditentukan dari teknik pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan atau tempat penelitian. Data primer meliputi catatan lapang, wawancara baik yang terstruktur maupun wawancara yang tidak terstruktur . data yang kedua adalah data sekunder, data sekunder merupakan data-data yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Pada umumnya data sekunder telah tersedia dan peneliti hanya mengumpulkan data tersebut tetapi harus dibatasi pada fokus penelitian yang dilakukan. Jenis data sekunder yang digunakan seperti buku, laporan, jurnal, dan data pendukung lain yang berkaitan dengan penelitian.

3.7. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tiga tahapan. Tahapan menurut (Sugiyono, 2013) sebagai berikut.

1. Reduksi data (*data reduction*)

Pada tahap pertama peneliti merangkum hal-hal pokok, berfokus pada masalah dan mencari tema serta pola penelitian, sehingga diperoleh data yang jelas dalam reduksi data. Dengan tahapan seperti itu peneliti lebih mudah dalam pengumpulan data selanjutnya. Dalam menjalankannya peneliti akan dipandu oleh tujuan penelitian yang akan dicapai sesuai dengan data yang ditemukan di tempat penelitian. Apabila di tempat penelitian peneliti mendapatkan data yang asing, tidak dikenal, dan tidak memiliki pola maka akan jadi perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

2. Penyajian data (*display data*)

Pada tahap ini, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan kategori, dan sebagainya. Peneliti sering menggunakan data yang bersifat naratif dalam penelitian kualitatif, hal tersebut dalam penyajiannya tidak semudah dalam ilustrasi yang diberikan, karena fenomena sosial yang diteliti bersifat dinamis dan sangat kompleks. Di tempat penelitian data yang ditemukan dan selama penelitian akan ditemukan perkembangan data. Maka dari itu, peneliti saat melakukan penelitian harus selalu menguji apa yang telah ditemukan yang masih bersifat dugaan itu berkembang atau tetap sama.

3. Penarikan kesimpulan (*concluding drawing*)

Pada tahap ketiga ini yaitu penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari dugaan awal sementara yang berupa data sementara dan didukung dengan fakta-fakta kuat dari data yang valid dan konsisten, untuk itu kesimpulan yang didapat bersifat kredibel. Kesimpulan yang kredibel adalah

kesimpulan yang menjawab rumusan masalah awal, tetapi tidak menutup kemungkinan peneliti mendapatkan kesimpulan yang didapatkan tidak menjawab rumusan masalah awal akan tetapi menemukan penemuan baru.

3.8. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini proses melakukan keabsahan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah upaya untuk memeriksa data dengan memanfaatkan hal lain yang di luar data sebagai pembanding maupun pengecek (Moleong, 2013:330). Triangulasi data dibagi menjadi tiga yaitu, triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan pengumpulan data.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari tempat penelitian melalui beberapa sumber (Moleong, 2014:331). Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu, peneliti membandingkan hasil temuan data dari beberapa informan. Peneliti menggunakan triangulasi sumber data dikarenakan dalam mengkaji mengenai relasi petani tembakau dan Perusahaan Tembakau setelah diberlakukannya Perda Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2003. Peneliti mendapatkan informasi dari berbagai sumber informasi, baik dari petani tembakau serta dari Perusahaan Tembakau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Kondisi Sosial Ekonomi Petani Tembakau Sebelum Perda Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2003

Mata pencaharian penduduk di Desa Kalisat mayoritas petani dan memiliki ketergantungan pada hasil pertanian dan perkebunan. Selain tanaman tembakau yang sebagai komoditas utama terdapat pula hasil pertanian dari tanaman lainnya. Petani tembakau merupakan mata rantai awal yang berperan juga sebagai produsen sebelum adanya Perda Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2003 tidak memiliki posisi tawar. Selain itu, keresahan petani tembakau terletak pada penentuan harga jual hasil panennya.

Hasil panen tembakau yang ditentukan oleh warna dan aroma yang menunjukkan kualitas dari daun tembakau dan bebas dari hama. Kualitas hasil tembakau merupakan tantangan bagi petani tembakau untuk menjaga kualitas tanaman tembakau mulai dari proses tanam sampai panen. Kutipan wawancara Bapak Suherma bahwa, perawatan tanaman tembakau memerlukan ketelatenan karena banyak proses yang dilalui dari proses tanam sampai panen yang mempengaruhi kualitas tanaman tembakau. Selanjutnya, resiko hilangnya permintaan terjadi ketika petani telah memanen hasil tembakaunya tetapi pihak pabrik atau perusahaan tidak bersedia membeli dikarenakan masih banyaknya daun tembakau yang tersedia.

Petani selain memiliki resiko tidak bisa menjual tembakaunya ke pabrik, kondisi pasar tanaman tembakau yang bersifat oligopsoni. Pasar tersebut membuat menurunnya posisi tawar petani.

“Petani tidak dapat mengakses langsung ke pabrik atau perusahaan, petani tembakau dalam jual tembakau harus melewati tengkulak yang kemudian tengkulak menjual ke pedagang sedang terus menjual ke pengepul besar yang ditunjuk pabrik” (hasil wawancara dengan Bapak Wiwin pada hari Senin tanggal 4 September 2017).

Dari penjelasan Bapak Wiwin, melihat adanya mata rantai penjualan daun tembakau yang panjang. Proses jual beli tembakau harus melewati atau diperantarai oleh tengkulak. Kemudian tengkulak menjual kembali ke pengepul sedang hingga dijual kembali ke pengepul besar yang sudah ditentukan oleh pabrik atau perusahaan.

Lemahnya posisi petani juga diakibatkan oleh panjangnya mata rantai tataniaga tembakau. Petani tidak dapat menjual tembakau hasil panennya kepada juragan, hal tersebut dikarenakan juragan hanya menerima tembakau dalam jumlah yang besar. Tengkulak merupakan kepanjangan tangan dari juragan untuk membeli tembakau dari petani tembakau. Tidak semua hasil penen dari petani dibeli oleh tengkulak, tembakau yang dibeli oleh tengkulak diseuaikan dengan kriteria dan kebutuhan dari perusahaan. Perusahaan telah membuat standart kualitas yang akan dibelinya, misalkan soal keharuman, warna, dan kelengketan tembakau (Anwar, 2017).

Dalam penetapan harga tembakau secara sepihak ditentukan oleh tengkulak yang menjadi perantara bagi perusahaan. Fenomena tersebut membuat ketentuan atau penetapan harga menjadi milik tengkulak. Dalam hal ini membuat tengkulak menjadi memiliki posisi tawar yang tinggi dan sebaliknya bagi petani. Di samping itu, hal tersebut juga membuat tumbuhnya ketergantungan petani tembakau yang sangat tinggi kepada tengkulak.

Posisi tersebut membuat opsi penjualan tembakau terbagi menjadi membeli langsung dalam bentuk tanaman (*tebbasan*) dan rajangan. Harga tembakau *tebbasan* lebih murah daripada rajangan, dikarenakan tanpa melewati proses pemetikan, penggulungan, penyimpanan, perajangan, dan penjemuran. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Bapak Condro.

“...dalam produksi saya sangat hati-hati dalam mengeluarkan biaya, karena panen harus menyesuaikan dengan harga yang ditentukan tengkulak. Oleh karena itu, tembakau dijual dalam langsung (*tebbasan*) dan rajangan. Saya sih dulu lebih memilih *tebbasan* karena umumnya dibeli dalam hitungan perpohon, jadi dalam satu hektar ada berapa pohon. Tembakau rajangan lebih mahal untuk dijual, tapi kadang tidak lebih menguntungkan...” (hasil wawancara dengan Bapak Condro pada hari Selasa tanggal 5 September 2017)

Senada dengan Bapak Condro, Bapak Suherma mengatakan.

“...petani menghadapi harga yang dari tengkulak. Penetapan harga yang tidak pasti dari tengkulak. Oleh karena itu, saya dulu menjual rajangan, biasanya petani yang memiliki modal untuk membayar kuli petik, gulung, rajang, dan jemur” (hasil wawancara dengan Bapak Suherma pada hari Rabu tanggal 6 September 2017)

Harga yang ditentukan tengkulak merupakan harga yang diberikan kepada petani berdasarkan informasi dari perusahaan dan perhitungan tengkulak sendiri. Informasi ini tidak sampai kepada petani tembakau, sehingga tengkulak mengambil keuntungan dari proses jual beli tembakau dengan memainkan harga. Misalnya dalam hal ini pabrik mematok harga tembakau dengan 25 ribu rupiah namun tengkulak membeli tembakau dari petani dengan harga 18 ribu rupiah sampai 20 ribu rupiah saja. Selain itu, perbedaan kualitas tembakau membuat adanya pemotongan harga yang dilakukan tengkulak.

Keterkaitan penentuan harga ditentukan dengan mutu tembakau yang dihasilkan. Akibatnya, harga bisa berubah tergantung pada hasil panen yang

disesuaikan dengan kualitas mutu yang dijual. Dalam hal ini, tengkulak memiliki posisi yang diuntungkan, tengkulak sebagai pihak yang menentukan harga tembakau berkuasa penuh serta sebagai penentu suatu tembakau untuk masuk ke dalam kualitas yang mana. Pada praktiknya, petani sebagai pihak yang sangat dirugikan. Hal tersebut dikarenakan, pihak pabrik tidak bersedia bertransaksi langsung dengan petani tembakau. Dalam hal ini tengkulak memiliki posisi sentral dan memiliki akses terhadap perusahaan.

Pembebanan seperti itu merupakan kebijakan dari tengkulak yang tidak dapat dihindari oleh petani tembakau. Petani menanggung proses penanaman sampai dengan panen tembakau dengan harga jual ditentukan oleh tengkulak. Penentuan harga tersebut membuat petani sama sekali tidak memiliki nilai tawar dalam menentukan kualitas dan harga tembakau.

Situasi yang dihadapi petani adalah hasil mekanisme pasar lokal terhadap hasil panen tembakau. Mekanisme pasar lokal menuntut petani mengeluarkan biaya lebih selama proses tanam, panen, pengolahan, sampai pemasaran. Keseluruhan proses yang membuat beban produksi yang tinggi dan padat modal. Selain itu, petani juga menghadapi keterbatasan alat produksi yang digunakan selama masa tanam tembakau.

Kehidupan petani yang bertolak belakang dengan kesejahteraan ini didukung oleh berbagai kondisi internal petani, yang kemudian diperburuk dengan kondisi eksternal petani tembakau. Kondisi internal ini meliputi keterbatasan lahan yang dimiliki serta kasus alih tanam karena mencari peluang

usaha tani yang lebih menjanjikan lagi. Selain itu, keterbatasan pemahaman dalam teknologi usaha tani yang lebih baik.

Faktor internal tersebut mengakibatkan petani tembakau tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan usaha tani secara optimal. Ketidakmampuan ini mengakibatkan meningkatnya biaya produksi yang dikeluarkan. Besar kecilnya keuntungan tembakau merupakan komponen yang dipengaruhi oleh biaya produksi yang membebani petani tembakau.

Biaya produksi tersebut akan berkaitan dengan keuntungan yang diterima. Ilustrasinya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Anwar

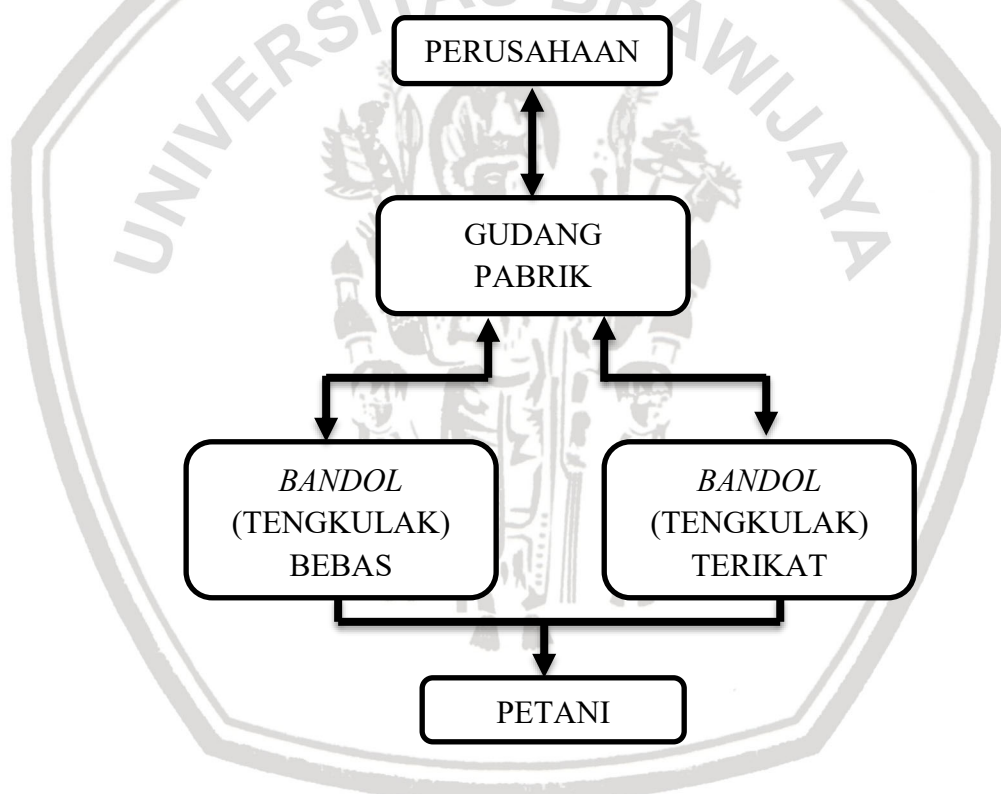
“..petani mendapatkan keuntungan rata-rata selama satu kali musim tanam sebesar Rp4.500.000. jika satu musim rata-rata berlangsung selama empat bulan dengan beban produksi mulai tanam sampai panen sebesar Rp3.500.000, maka petani tembakau hanya mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000.000. penghasilan ini relatif kecil ketika dibandingkan dengan resiko usaha yang ditanggung oleh petani, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, cuaca, hama, dan turunnya harga daun tembakau.” (hasil wawancara dengan Bapak Anwar pada hari Senin tanggal 4 September 2017)

Disisi eksternal, kondisi ini yang sangat menekan petani tembakau, yaitu perilaku tengkulak yang secara sepihak menentukan kualitas, timbangan, dan harga tembakau hasil panen serta sebagai produk tanam yang bersifat oligopsoni, sejumlah gudang yang dimiliki perusahaan sangat mudah dalam mempermainkan “daya tampung” gudang agar petani bersedia menjual hasil panennya dengan harga yang sangat murah. Situasi seperti ini membuat jadwal pembelian juga dipermainkan untuk menekan harga tembakau dari petani.

4.2 Tataniaga Pertanian Tembakau Sebelum Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003

Tataniaga tembakau sebelum adanya Perda Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2003 merupakan ketidakberdayaan petani tembakau. Tataniaga tersebut beberapa aktor terlibat dalam tataniaga tembakau. Dalam tataniaga tembakau petani tembakau merupakan actor yang sangat lemah.

Bagan 2. Tataniaga Pertanian Tembakau Sebelum Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003



Bandol (tengkulak) bebas membeli tembakau langsung dari petani dan menjual secara bebas kepada juragan mana saja. *Bandol* (tengkulak) terikat membeli tembakau langsung kepada petani tembakau dan menjual hanya pada satu juragan tertentu. Juragan merupakan pemilik gudang yang dipercaya

gudang pabrik untuk membeli tanaman tembakau sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh gudang pabrik.

Pada saat menjelang masa panen. *Bandol* atau tengkulak mulai mencari tanaman tembakau yang akan dibeli. Dalam pembelian tersebut, *bandol* membeli tembakau terdiri dari dua jenis, dalam bentuk tanaman atau tebbasan dan membeli dalam bentuk rajangan. Harga beli tanaman tebasan lebih murah daripada rajangan. Hal tersebut karena tebbasan tidak melewati proses pemetikan, penggulungan, penyimpanan, perajangan dan penjemuran. Tembakau rajangan lebih mahal tetapi tidak selalu menguntungkan.

Petani pada saat itu lebih suka menjual tebbasan daripada rajangan. Petani yang menjual secara rajangan biasanya memiliki modal untuk membiayai dalam proses perajangan. Namun, permasalahan utamanya terdapat pada harga beli *bandol* yang tidak pasti. Pembayaran pembelian tembakau adakalanya dibayar pada awal saat kesepakatan sebelum panen, terkadang pada akhir saat telah panen tembakau. Pembayaran diakhir biasanya dikarenakan menunggu tembakau tersebut dibeli oleh pemilik gudang. Kedua model pembayaran tersebut memiliki permasalahan tersendiri bagi petani tembakau.

Dalam pembelian tembakau, *bandol* menerapkan sistem potong timbangan. Jika misalkan berat satu *bal* tembakau 51kg, *bandol* biasanya menghitungnya menjadi 50kg. Selain pemotongan tersebut, terdapat pemotongan kepala, yaitu 5kg karena berat satu *bal* 50-an kg. Petani tidak memprotes tindakan *bandol* tersebut. Petani menganggap tindakan tersebut sebagai

pengganti biasa transportasi dan komisi karena telah meloloskan tanaman tembakau tersebut ke gudang pabrik untuk dibeli.

Pembayaran pembelian diakhir lebih parah lagi, selain menghadapi pemotongan timbangan petani tembakau juga terancam tidak dilunasi pembayarannya. Tidak adanya pelunasan pembayaran yang dilakukan *bandol* dikarenakan *bandol* yang merugi karena menurunnya harga pasar atau permainan gudang pabrik. Petani juga tidak melawan *bandol* yang tidak melunasi pembayaran dan memilih untuk membiarkan kehilangan uang yang tidak sedikit jumlahnya.

Lemahnya posisi petani tembakau diakibatkan panjangnya rantai tataniaga tembakau. Petani tidak dapat menjual secara langsung kepada gudang pabrik atau perusahaan karena gudang pabrik atau perusahaan menerima pembelian dalam jumlah besar. *Bandol* dalam hal ini merupakan kepanjangan tangan juragan dalam membeli tembakau dari petani.

Tembakau yang dibawa *bandol* tidak mendapat jaminan bahwa semua tembakau akan dibeli oleh juragan. *Bandol* masih akan melewati *grader* di gudang. *Grader* adalah orang yang menentukan kualitas serta harga tembakau yang telah dibawa oleh *bandol*. *Grader* membantu juragan untuk memutuskan harga beli tembakau dari *bandol*, namun ada juga *grader* tersebut merupakan pemilik gudang itu sendiri. Ada tiga kualitas dalam mentukan bagus tidaknya tembakau yaitu keharuman, warna, dan kelengketan.

Grader menentukan secara sepihak kualitas dan harga tembakau. *Bandol* dalam hal ini tidak bias melakukan tawar-menawar, kecuali hanya berharap dan

memohon agar tembakaunya dibeli dengan harga yang tinggi. *Bandol* akan mengalami kerugian ketika tembakau yang dibeli gudang lebih murah daripada ketika *bandol* membeli tembakau dari petani tembakau. Ketika harga beli dari gudang harganya di atas harga yang dibayarkan petani namun masih belum menutup ongkos produksi. Ketidakpastian harga dari *grader* di gudang serta ketidakberdayaan *bandol* menawar harga memunculkan sistem bayar di akhir oleh *bandol* kepada petani tembakau. Petani tidak berdaya untuk menolak sistem tersebut atau menolak harga yang ditentukan oleh *bandol* karena panjangnya sistem tataniaga dalam pertanian tembakau.

Setiap tembakau yang dibeli oleh juragan dari *bandol* sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan sesuai kebutuhan pabrik. Biasanya juragan terikat dengan satu pabrikan, namun tidak sedikit juragan yang bebas menjual tembakaunya ke pabrik mana saja. Juragan melakukan pengelompokan jenis tembakau perjenis pabrikan. Pabrik biasanya telah memberikan arahan tentang kualitas yang akan dibelinya.

Jika ada tembakau yang tidak dibeli oleh pabrikan, maka juragan akan menyimpan tembakaunya di gudang. Gudang tersebut memiliki kualifikasi sehingga dapat menyimpan tembakau dalam waktu lama biasanya untuk satu tahun kedepan. Umumnya juragan tidak mengalami kerugian karena masih dapat menyimpan tembakau yang ditawarkan murah oleh pabrik dan akan dijual tahun depan. Resiko yang dihadapi juragan hanya penundaan ketika tembakaunya banyak yang tidak terbeli tahun ini. Juragan akan menjual semua tembakau yang dimilikinya jika kuota pembelian pabrik belum terpenuhi dan harga dirasa

menguntungkan bagi juragan. Hal sebaliknya, juragan akan menyimpan tembakaunya jika kuota pembelian parik telah terpenuhi atau harga beli dari pabrik dianggap tidak menguntungkan juragan.

Di luar kuota dan harga yang tawara dari pabrikan, masalah lain yang dihadapi juragan adalah waktu pembelian yang tidak mentu. Beberapa tahun terakhir waktu pembelian pabrik tidak menentu. Ada kalanya hanya ada satu pabrik saja yang buka, sementara lainnya tutup. Akibatnya, adanya persaingan antar juragan untuk menjual tembakaunya di pabrik tersebut.

4.3 Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pengusahaan Tembakau

Semenjak otonomi daerah dicanangkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian dirubah melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 35 Tahun 2004, iklim regulasi di Indonesia mengalami perubahan besar. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan hukum dan administrasi kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk mengatur dan mengadministrasikan perdagangan dan industri. Oleh karena itu, pemerintah daerah berhak mengenakan regulasi dan perizinan usaha.

Pemerintah Kabupaten Jember telah mengesahkan Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pengusahaan Tembakau. Perda ini menjamin perlindungan dan pemberdayaan bagi petani tembakau yang wajib dilakukan oleh pemerintah. Perda ini dilatar belakangi oleh keadaan petani

tembakau yang sering mengalami kerugian, baik akibat kebijakan maupun kondisi alamiah. Perda ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, antarlain.

1. Untuk mendapatkan keuntungan bersama bagi para pelaku pertembakauan, mulai dari petani, pedagang, dan pengusaha/eksportir dan institusi lain dengan berlandaskan atas keseimbangan dan berkesinambungan dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakat.
2. Melestarikan tanaman tembakau sebagai komoditas unggulan Kabupaten Jember.

Melalui perda ini, Pemerintah Kabupaten Jember memberi jaminan kesejahteraan kepada petani tembakau dengan mengharuskan adanya kemitraan antara petani tembakau dan perusahaan tembakau. Jaminan tersebut ditegaskan pada **BAB IV KEMITRAAN DALAM PENGUSAHAAN TEMBAKAU** Pasal 10 (1) Pengusaha wajib melakukan kemitraan dengan petani dan/atau kelompok tani ; (2) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Asosiasi Petani Tembakau dan Asosiasi Pedagang Tembakau dapat bertindak sebagai Mitra Media ; (3) Pengusaha dan petani dan/atau kelompok tani dapat memilih bentuk dan model kemitraan sesuai kebutuhan kedua belah pihak yang saling menguntungkan, dengan berpedoman kepada Panduan Kemitraan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ; (4) Hak dan kewajiban pengusaha dan petani dan/atau kelompok tani dituangkan dalam Nota Kesepakatan.

Perda ini juga menjamin tentang penentuan standar mutu dan harga yang ditentukan oleh Komisi Urusan Tembakau Jember (KUTJ). Sehingga standar

mutu dan harga sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan pihak yang bermitra. Penentuan tersebut dijelaskan pada,

BAB VI

PERDAGANGAN TEMBAKAU

Pasal 14

- (1) Petani dan/atau kelompok tani dan pedagang berhak untuk melakukan perdagangan tembakau sesuai dengan standard mutu dan harga yang berlaku ;
- (2) Apabila telah terjalin kemitraan antara petani dan/atau kelompok tani dengan pengusaha, maka para pihak wajib memperhatikan :
 - a. Mengutamakan anggota mitra dalam perdagangan tembakau.
 - b. Standarisasi mutu dan harga sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama kemitraan.

Pasal 15

Dalam menentukan dan memberi penilaian terhadap standard mutu yang berlaku untuk perdagangan tembakau, para pihak yang melakukan perdagangan tembakau dapat meminta pertimbangan kepada KUTJ.

Perda ini memang belum sepenuhnya dapat membebaskan petani tembakau dari jeratan tataniaga yang timpang dan posisi tawar yang lemah dari petani tembakau. Tetapi, perda ini memberikan peluang dan jalan bagi upaya perlindungan dan pemberdayaan petani tembakau agar lebih sejahtera.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai hasil dan pembahasan pada penelitian ini. Pada penjabaran ini, nantinya akan terbagi kedalam beberapa subab yang menjelaskan mengenai modal sosial yang terjadi dalam relasi antara petani tembakau dan perusahaan serta perubahan relasi setelah adanya Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Tembakau. selain itu, dalam penjelasan subab terdapat 3 parameter dalam modal sosial yaitu kepercayaan (*trust*), jaringan (*network*), dan norma (*norm*) yang menjadi sumber pendukung dalam relasi yang terjadi antara petani tembakau dan perusahaan.

Relasi yang terjadi antara petani tembakau dan perusahaan membuat adanya penyesuaian dan perubahan agar lebih menguntungkan semua pihak. Dalam menjalankan relasi tersebut petani dan perusahaan tembakau memanfaatkan modal sosialnya. Modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong aktor-aktornya bertindak bersama secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan bersama (Putnam, 1996 dalam Field, 2011). Modal sosial yang terjalin dimanfaatkan untuk menjalin kerjasama dalam pengembangan tanaman tembakau sehingga tujuannya untuk menguntungkan semua pihak. Dalam relasi tersebut petani tembakau dan perusahaan membangun jaringan yang menciptakan sebuah kepercayaan antara keduanya yang menerapkan adanya aturan atau norma yang telah disepakati sehingga tujuan bersama yang dituju lebih cepat tercapai.

Putnam, membagi modal sosial menjadi 2 bentuk, yakni *bonding* sosial *capital* (modal sosial yang mengikat) dan *bridging* sosial *capital* (modal sosial yang menjembatani) (Hasbullah, 2006). Menurut Putnam (1993) menjelaskan *bonding* sosial kapital dalam bahasa lain menyebutkan sebagai ciri *scared society* yang di dalamnya terdapat dogma yang mendominasi, totalitarian, hierarki, dan tertutup. Tetapi, modal sosial dapat terjalin apabila terdapat *bonding* sosial *capital* yang kuat. Selain itu, *bridging* sosial *capital* membuka peluang akses dari setiap anggota untuk terlibat dalam jejaring yang lebih luas. Dalam hal ini, modal sosial yang menjembatani lebih menguntungkan dan dapat menciptakan modal sosial yang lebih besar dan luas. Kedua bentuk modal sosial tersebut digunakan untuk mengembangkan jaringan modal sosial. Jejaring tersebut modal sosial yang terikat yang terjadi di antara petani tembakau saja yang berada di Desa Kalisat. Petani tembakau di Desa Kalisat kemudian menjalin adanya hubungan dengan sesama petani yang menjalin hubungan dengan perantara perusahaan yang didasari pada rasa kepercayaan dan dengan aturan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

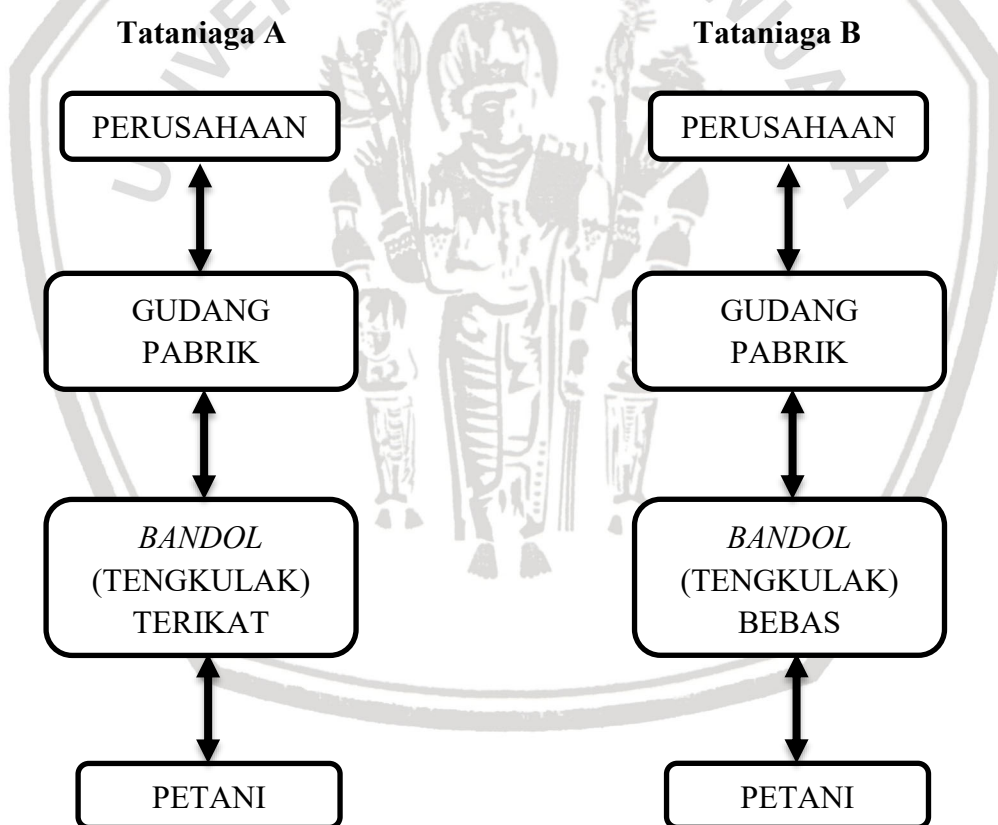
Bridging sosial *capital* yang merupakan jaringan yang lebih luas dan lebih longgar, petani tembakau menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan. Kerjasama yang terjalin antara petani tembakau dan perusahaan dipandang lebih menguntungkan untuk menciptakan modal sosial yang lebih besar dan lebih luas untuk tujuan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini peneliti menguraikan teori modal sosial Putnam untuk menjelaskan modal sosial yang terjadi dalam relasi petani tembakau dan perusahaan setelah adanya Perda Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2003 tentang pengusahaan tembakau.

5.1 Perubahan Tataniaga Tembakau

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pengusahaan Tembakau yang mewajibkan perusahaan tembakau untuk bermitra dengan petani tembakau. Kemitraan tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai tataniaga tembakau yang sangat panjang. Dengan adanya kemitraan antara petani tembakau dan perusahaan membuat perubahan dalam kelembagaan tataniaga tembakau.

Di Desa Kalisat terdapat dua model tataniaga tembakau sebelum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003.

Bagan 3. Tataniaga Pertanian Tembakau Di Desa Kalisat



Dua model tataniaga tembakau di atas mengalami perubahan setelah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 tentang pengusahaan tembakau.

5.1.1 Perubahan Tataniaga A

Dalam tataniaga A sebelum adanya perda, petani tembakau menjual tembakaunya ke *bandol* terikat. Petani lebih memilih menjual tembakaunya ke *bandol* terikat atas dasar kepercayaan.

“kalau saya menjualnya gara-gara percaya, karena *bandol* terikat memiliki akses ke juragan yang sudah dipercaya gudang. Jadi modal percaya aja soalnya kalo masalah harga jual petani ikut *bandol* saja..” (hasil wawancara dengan Bapak Suherma pada hari Rabu tanggal 6 September 2017)

“...*bandol* terikat biasanya mencari tembakau untuk dibeli dari petani yang sudah biasa dibeli, itu biasanya. Tapi kalo dirasa kurang dalam jumlah ya nyari dari petani lain yang jual tembakaunya...” (hasil wawancara dengan Bapak Wiwin pada hari Senin tanggal 4 September 2017).

Dari ungkapan informan, kepercayaan menjadi hal yang penting bagi petani menjual tembakaunya ke *bandol* terikat. Petani dan *bandol* terikat memiliki kepercayaan yang terjalin antar satu sama lain yang membuka adanya hubungan sosial yang diinginkan. Jual beli antara petani dan *bandol* terikat berawal dari pengalaman dalam melakukan kerjasama.

Gudang pabrik Sempurna tidak memilih *bandol* terikat secara acak. Kepercayaan antara gudang pabrik sempurna dan *bandol* terikat yang membuat adanya kerjasama antar keduanya. Komponen kepercayaan tersebut sangat dibutuhkan untuk memulai hubungan sosial dengan orang baru yang belum dikenal sebelumnya.

“gudang pabrik dalam membeli tembakau dari *bandol* tidak memilih secara acak, bisa rugi nanti kalau kualitasnya buruk. Jadi kita beli yang sesuai dengan kriteria, ketika *bandol* sering menjual dengan kualitas yang baik baru kita Tarik jadi *bandol* yang Cuma jual di gudang ini saja, soalnya kita percaya kualitasnya dan sesuai kebutuhan juga” (hasil wawancara dengan Bapak Darto pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017)

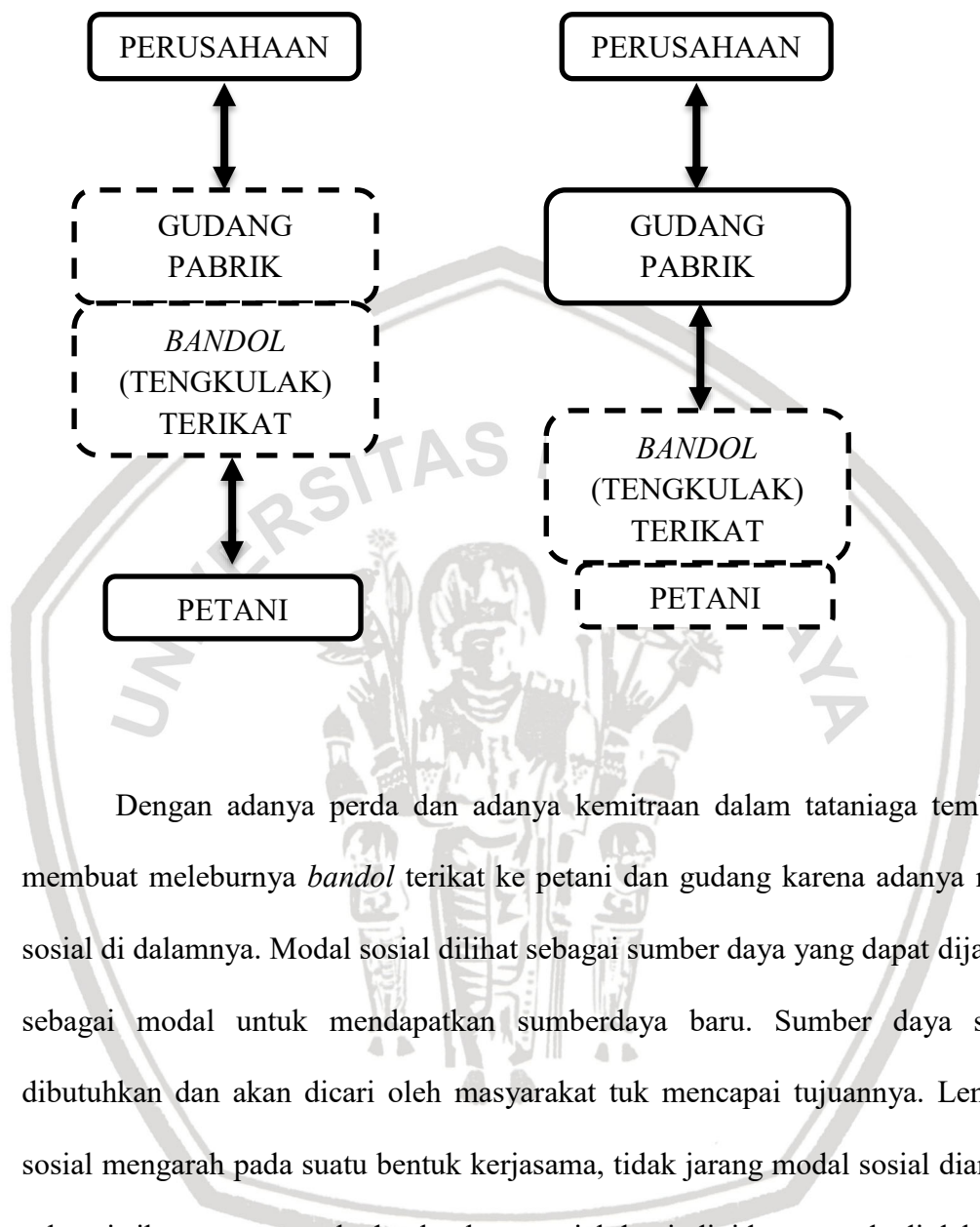
Kepercayaan antara gudang dan *bandol* terikat bisa hilang jika tidak terpelihara dengan baik. Kepercayaan merupakan entitas yang tidak tetap, sehingga membutuhkan treatment agar mampu menjadi modal sosial yang kokoh.

Dalam tataniaga A, pihak-pihak yang terlibat dalam menjalin hubungan saling memberi kepercayaan, dalam modal sosial sendiri kerjasama akan lebih mudah jika terdapat sebuah norma didalamnya (Putnam, 1993). Dalam tataniaga tembakau menciptakan sebuah norma yaitu ada kesepakatan jual beli dalam penentuan kualitas dan harga yang disepakati. Penentuan kualitas yang menentukan harga, dilakukan sepihak oleh *bandol* maupun dari gudang. Tetapi, penentuan harga yang sepihak tetap disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat sebagai aturan dalam hubungan tataniaga. Jaringan sosial dapat berbeda antar pihak yang terlibat dalam tataniaga A. jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi yang dapat menumbuhkan kepercayaan dan memperkuat kerjasama.

Dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 yang berisi tentang wajibnya perusahaan tembakau untuk bermitra dengan petani. Hubungan kemitraan tersebut bertujuan untuk memotong jalur tataniaga yang panjang. Selain itu, kemitraan tembakau membuat adanya kejelasan harga tembakau dan adanya aturan kesepakatan yang jelas. Kemitraan bertujuan lebih mengangkat pendapatan petani tembakau dari segi ekonomi.

Dengan pemotongan jalur tataniaga, membuat peran *bandol* yang menghilang dalam tataniaga tembakau. Menghilangnya peran *bandol* melebur ke dalam petani tembakau dan perusahaan.

Bagan 4. Perubahan Tataniaga Pertanian Tembakau A



Dengan adanya perda dan adanya kemitraan dalam tataniaga tembakau membuat meleburnya *bandol* terikat ke petani dan gudang karena adanya modal sosial di dalamnya. Modal sosial dilihat sebagai sumber daya yang dapat dijadikan sebagai modal untuk mendapatkan sumberdaya baru. Sumber daya sangat dibutuhkan dan akan dicari oleh masyarakat tuk mencapai tujuannya. Lembaga sosial mengarah pada suatu bentuk kerjasama, tidak jarang modal sosial dianggap sebagai sikap percaya terhadap lembaga sosial dan individu yang ada di dalamnya yang dipercayai mampu memberikan sumberdaya yang dibutuhkan.

Dalam suatu hubungan sosial, kepercayaan merupakan hal yang penting dan harus dipelihara. Kepercayaan tidak semata-mata hadir dalam hubungan sosial, namun diperlukan sebagai hubungan positif dan tindakan kooperatif yang

terus menerus terjadi di antara pelaku. Kepercayaan merupakan akumulasi dari berbagai bentuk interaksi sosial dalam hubungan sosial khususnya dalam hal ini pada tataniaga tembakau. Hadirnya kepercayaan akan mempermudah dalam mencapai tujuan bersama. Putnam mengungkapkan, kepercayaan sosial merupakan produk dari modal sosial yang baik, adanya modal sosial yang baik ditunjukkan dengan lembaga-lembaga sosial yang kokoh sehingga modal sosial melahirkan kehidupan sosial yang harmonis (Putnam, 1995 dalam Suharto, 2005).

“ada beberapa *bandol* terikat yang ditarik gudang, karena sudah lama jual beli tembakau juga dengan gudang. Yang ditarik itu yang selalu jual tembakaunya ke gudang sini. Selama ini juga hubungan jual beli juga baik, jadi ya ditarik aja ke gudang” (hasil wawancara dengan Bapak Darto pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017).

Dari ungkapan informan diatas memperlihatkan hubungan yang telah terjalin lama. Terdapat hubungan timbal balik dari hubungan jual beli *bandol* terikat dan gudang dari yang didapatkan dan diberikan. Penarikan *bandol* terikat untuk masuk ke gudang merupakan bentuk tindakan yang dilakukan atas dasar kepentingan bersama dan bertujuan untuk saling membantu satu sama lain.

Bandol terikat yang ditarik masuk ke gudang membantu gudang dalam menjaring petani dan membantu dalam pemenuhan kebutuhan tembakau dari petani.

“...*bandol* kan yang membeli tembakau dari petani, perusahaan lewat gudang kurang tau jadi menarik *bandol* untuk masuk ke gudang. Ya kan *bandol*nya mendapat pekerjaan, gudang juga dapat mitra petani yang dipercaya” (hasil wawancara dengan Bapak Wiwin pada hari Senin tanggal 4 September 2017).

Dari pemaparan informan diatas mencerminkan hadirnya rasa percaya ketika *bandol* ditarik untuk bekerja di gudang tembakau.

Selain *bandol* yang ditarik perusahaan sebagai pegawai gudang, ada *bandol* yang menjadi petani mitra karena memiliki lahan dan tidak ditarik oleh pihak gudang. Seperti pemaparan bapak

“itu ada dulu jadi *bandol*, tapi karena ada program kemitraan *bandolnya* jadi petani tembakau terus ikut bermitra. Tidak ada pekerjaan lain, jadi mitra dengan perusahaan tembakau pilihan yang menguntungkan...”(hasil wawancara dengan Bapak Suherma pada hari Rabu tanggal 6 September 2017)

Karena melalui kepercayaan yang telah diyakini memungkinkan adanya kerjasama yang terjalin. Keputusan yang diambil oleh *bandol* memiliki konsekuensi yang menjadi tanggung jawab sendiri. Putnam mendefinisikan kepercayaan sebagai sebuah keinginan untuk mengambil resiko yang ada di dalam hubungan sosial yang didasari dengan perasaan yakin pihak yang lain akan melakukan hal yang sama dan diharapkan bertindak dalam suatu pola tindakan yang mendukung, setidaknya tidak merugikan (Hasbullah, 2006).

Dalam perubahan tataniaga, *bandol* yang menjadi pegawai gudang terikat dengan aturan perusahaan yang sudah tertera dalam kontrak kerja. Aturan tersebut jelas dan legal sebagai bentuk kerjasama. *Bandol* yang menjadi petani dan menjadi mitra perusahaan terikat dengan aturan kesepakatan kemitraan sebagai petani tembakau dengan perusahaan mitra.

Jaringan yang sudah dibentuk akan lebih erat dalam menjalankan interaksi sosial jika didalamnya terdapat norma atau kesepakatan yang harus ditaati bersama. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi yang menumbuhkan kepercayaan dan memperkuat dalam kerjasama. Hubungan sosial tersebut didasarkan atas unsur kesamaan dan keterkaitan. Dalam hal ini, kemampuan membangun jaringan sosial diikuti strategi dalam memilih jaringan

sosial yang dapat memberikan keuntungan bagi tujuan individu atau tujuan bersama.

5.1.2 Perubahan Tataniaga B

Pada tataniaga B, *bandol* bebas membeli tembakau ke petani yang lahannya akan memasuki masa panen atau membeli pada petani yang menjual pada waktu tertentu. *Bandol* bebas sama halnya dengan *bandol* terikat dalam menentukan harga beli dari petani. *Bandol* membeli tembakau dengan harga yang telah ditentukan *bandol* dan ada pemotongan dalam timbangan tembakau. *Bandol* bebas menjual hasil beli tembakaunya dari petani ke gudang mana saja yang membutuhkan pasokan tembakau dan harga yang menguntungkan.

Petani memilih menjual ke *bandol* bebas karena berbagai alasan, seperti diungkapkan oleh bapak

“petani menjual tembakaunya ke *bandol* bebas biasanya karena di *bandol* terikat tidak membelinya karena tidak sesuai dengan kriteria dari gudang yang ditentukan, selain itu daripada tidak laku yawes pokok laku dan menghasilkan uang...”(hasil wawancara dengan Bapak Suherma pada hari Rabu tanggal 6 September 2017)

“saya menjual ke *bandol* bebas soalnya lebih percaya aja, dia kan tidak menjual di satu gudang. *Bandol* bebas bisa menjual di gudang a, b, gudang c. menurut perhitungan mana yang lebih menguntungkan” (hasil wawancara dengan Bapak Wiwin pada hari Senin tanggal 4 September 2017).

Dua pernyataan informan diatas menunjukkan adanya komunikasi dan interaksi yang terfasilitasi dari adanya jaringan yang memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan kerjasama.

Jaringan memungkinkan terjadinya sirkulasi informasi dan menjadi stimulus pelaku untuk menjadi bagian dalam jaringan sosial tersebut dengan merespon informasi yang diterima. Putnam menjelaskan bahwa hubungan antar simpul yang ada pada suatu jaringan hanya dapat diketahui dari interaksi yang

terjadi diantara mereka. Fungsi dari interaksi menyebarkan informasi ke dalam jaringan sosial yang memungkinkan mereka mengambil tindakan kolektif untuk mengatasi permasalahan bersama (Lawang, 2004).

Bandol bebas memiliki jaringan ke berbagai gudang guna menjual tembakau miliknya. Jaringan yang dimiliki *bandol* bebas lebih luas meliputi beberapa gudang tembakau. Selain itu, menurut Bapak Bambang petani lebih mengenal *bandol* bebas karena mereka lebih berkeliling dan membeli tembakau dengan berbagai kualitas.

Dalam tataniaga B aturan berperan mengatur dan mengontrol tindakan dan perilaku pelaku tataniaga. Aturan atau norma diharapkan terjalin kesesuaian antar individu yang memupuk tumbuhnya rasa percaya dan menciptakan jaringan sosial yang aman. Tujuan dari adanya aturan agar mampu memicu permasalahan atau hal-hal yang merugikan pelaku-pelaku.

“aturan tataniaganya ya kesepakatan jual beli itu, itu sudah kesepakatan dan kadang ada surat perjanjian juga. Itu jual beli antara *bandol* dan petani atau *bandol* dan gudang perusahaan. Itu pasti ditaati dan dipatuhi dalam jual beli, apalagi itu masalah hasil panen yang ditunggu-tunggu” (hasil wawancara dengan Bapak Wiwin pada hari Senin tanggal 4 September 2017).

“kesepakatan jual beli selama ini dipatuhi, mulai penetapan timbangan sampai harga tembakau itu sendiri. Ya tidak ada yang sampai ada masalah waktu itu, meskipun harganya naik turun...”(hasil wawancara dengan Bapak Suherma pada hari Rabu tanggal 6 September 2017)

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 tentang pengusahaan tembakau membuat adanya perubahan dalam tataniaga B. *Bandol* bebas kebanyakan tidak ditarik menjadi pegawai di gudang perusahaan sempurna. *Bandol* bebas tetap menjadi *bandol* tetapi mereka bermitra dengan perusahaan sempurna. *Bandol* bebas mengambil hasil dari petani tembakau kecil

yang tidak masuk dalam kriteria terutama luas lahan untuk bermitra. Sehingga *bandol* bebas membeli hasil panen tembakau dari petani kecil dengan membeli lebih murah dari kesepakatan harga dalam kemitraan.

Tidak banyak *bandol* bebas yang tidak mempunyai lahan memilih untuk mencari mata pencaharian lain diluar perusahaan tembakau. Gudang perusahaan sempurna tidak memilih *bandol* bebas untuk dimasukkan dalam gudang sebagai pegawai.

“kita tidak memilih *bandol* bebas, meskipun jaringan lebih luas kepercayaan kami lebih kepada yang telah lama menjual tembakaunya kepada gudang ini. Itu yang menjadi kriteria awal kami.” (hasil wawancara dengan Bapak Darto pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017).

Kurangnya kepercayaan perusahaan kepada *bandol* bebas membuat *bandol* bebas memilih menjadi petani atau berhenti dari bidang pertanian tembakau.

5.3. Modal Sosial Dalam Kemitraan Pertanian Tembakau

Modal sosial adalah sumber daya yang tertanam pada jaringan sosial dan digunakan oleh aktor-aktornya untuk melakukan suatu tindakan (Lin, 2004: 24-25). Putnam (dalam Field, 2011) menjelaskan modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong aktor-aktornya bertindak bersama secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan bersama. Modal sosial merupakan elemen yang sangat penting dalam terjalinnya kerjasama antara anggota masyarakat. Dalam kerjasama tersebut seseorang akan cenderung mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Hubungan kerjasama disini akan terjadi hubungan timbal balik atas dasar nilai dan norma yang ada sehingga hubungan yang terjalin berlangsung lama.

Kerjasama akan muncul ketika terdapat hubungan yang saling mengikat dalam sebuah jaringan sosial. Dalam kerjasama, setiap pihak yang terlibat

memberikan hak dan kewajibannya untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kesepakatan atau norma yang telah ditentukan dan dijalankan. Pembentukan norma digunakan sebagai ketentuan pihak-pihak yang terlibat tanpa perlu saling mengawasi. Norma dilaksanakan jika pihak-pihak yang terlibat di dalamnya saling percaya. Norma dan kepercayaan yang saling berkesinambungan merupakan indikator keberhasilan kerjasama. Melihat dari pengertian modal sosial menurut Putnam yang menjelaskan bahwa modal sosial adalah bagian dari jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang bertindak bersama-sama dalam mencapai tujuan bersama.

Modal sosial memiliki tiga indikator di dalamnya yaitu, jaringan, kepercayaan, dan norma yang saling berkesinambungan. Ketiga indikator tersebut sangat berperan penting dalam menjalankan kerjasama. Dalam relasi antara petani tembakau dan perusahaan menerapkan modal sosial. Dalam menjalankan modal sosial tersebut petani dan perusahaan menerapkan ketiga indikator tersebut. Modal sosial digunakan untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan tanaman tembakau serta mensejahterakan pihak-pihak yang ada di dalamnya.

Jaringan merupakan infrastruktur yang dinamis dari suatu modal sosial yang berwujud jaringan kerjasama antar manusia. Jaringan tersebut memberi fasilitas sehingga terjadi komunikasi dan interaksi yang memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Jaringan-jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama para anggotanya serta manfaat-manfaat dari partisipasinya itu (Putnam, 1995: 75-76). Jaringan sosial terjadi berkat adanya suatu interaksi sosial dan keterkaitan antara individu dan kelompok. Jaringan sosial memungkinkan pula terjadinya sirkulasi informasi dan

menstimulus pelaku sehingga menjadi bagian dari jaringan tersebut dengan saling merespon informasi yang telah diterimanya.

Jaringan yang terjadi dalam pertanian tembakau terjadi karena adanya tujuan mencari keuntungan dengan meminimalisir biaya dan transaksional. Dengan menciptakan jaringan pertanian tembakau di Desa Kalisat dapat meningkatkan produktivitasnya. Petani tembakau tidak bisa menjual hasil panennya tanpa adanya pihak lain yang terlibat. Sehingga petani tembakau membuka jaringan kerjasama dengan perusahaan.

“kalo ga ada pihak lain bingung mau ngejual kemana, ya akhirnya kita tanya ke petani lain untuk ngejual kemana. Sama petani ngasih tau, meskipun beda mitra tapi masalah harga jual ya ngasih tau, jadi tau selisihnya berapa. Kalo sekarang ya ga bingung, sekarang udah ada kerjasama dengan perusahaan. Sekarang saya mitra dengan sempurna, jadi ga bingung jual sama modalnya buat tembakau ini” (hasil wawancara dengan Bapak Suherma pada hari Rabu tanggal 6 September 2017).

Jaringan yang terbangun sangat dibutuhkan dalam setiap operasional pertanian tembakau, sama halnya yang dilakukan petani tembakau. Jaringan ini merupakan jaringan yang terjadi antara petani tembakau yang ada di Desa Kalisat. Kerjasama yang dibangun antara sesama petani tembakau dan antara petani dan perusahaan merupakan hubungan kerjasama dalam pertanian tembakau dengan tujuan kesejahteraan bersama. Jaringan yang mengikat merupakan jaringan yang terjalin antara orang dalam situasi yang sama yang saling mengikat. Ikatan kerjasama tersebut merupakan bentuk ikatan *bonding* karena memiliki kesamaan bidang yang dikerjakan yaitu dalam pertanian tembakau.

Dalam relasi antara petani tembakau dan perusahaan, perusahaan juga menciptakan jaringan. Modal sosial dalam perusahaan memiliki inisiatif dalam

membuka jaringan kepada petani tembakau dalam usaha pengembangan pertanian tembakau sesuai Perda Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2003.

“ya ada aturan yang membuat perusahaan wajib mitra dengan petani tembakau. perusahaan juga berupaya membuat petani sejahtera. Sempurna tahun 2009 membuat program IPS, program sistem produksi terintegrasi yang menyerap petani sebagai mitra bagi perusahaan. Sekarang saja sekitar 27.000 petani bergabung, tapi itu bukan Cuma jember saja. Dari tempatt lain juga masuk dalam program ini.” (hasil wawancara dengan Bapak Darto pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017).

Jaringan yang terbangun sejak adanya Perda Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2003, perusahaan membuat jaringan dengan petani dengan tujuan mensejahterakan petani tembakau. Saat ini, perusahaan sempurna telah membuat jaringan dengan kurang lebih sekitar 27.000 petani sebagai mitra perusahaan. Jaringan antara perusahaan dengan petani yang terbangun adalah kerjasama yang sama-sama mengembangkan tembakau dan kerjasama dalam tataniaga tembakau.

Jaringan yang terjadi antara petani tembakau dan perusahaan memiliki manfaat dan keuntungan yang didapat. Putnam (2000:43) menjelaskan jaringan yang kuat akan memperkuat perasaan kerjasama anggotanya serta manfaat dalam partisipasinya. Jaringan yang terjalin antara petani tembakau dan perusahaan memiliki ikatan yang sangat kuat yang didasari oleh nilai dan kepercayaan. Jaringan ini memiliki manfaat dalam memperkuat dalam usaha pengembangan tembakau dan mensejahterakan anggota kemitraan. Selain itu, hubungan timbal balik yang terjadi antara kedua belah pihak membuat hubungan yang dibangun semakin kuat.

Dalam berjejaring dengan pihak lain harus memiliki cara tersendiri yang harus dilakukan. Berjejaring tidaklah mudah, perusahaan dan petani tembakau

harus memiliki cara dalam berjejaring. Dalam kemitraan pertanian tembakau, perusahaan memiliki cara untuk menarik petani tembakau agar bermitra.

“perusahaan ngga langsung mitra dengan petani, perusahaan ngubungi petani yang sudah bermitra untuk mencari petani lain yang ingin bermitra. Saya pernah kayak jadi penghubungn antara perusahaan dengan petani. Saya kasih tau ke petani kalo bermitra nanti dapet bibit, dapet modal buat nanem, terus pasti dibeli hasil panen nanti. Akhirnya ya banyak juga yang mau bermitra sama sempurna. Daripada susah jual hasil panennya. Akhirnya perusahaan datang ya kontrak kerjasama ya pendekatan dulu” (hasil wawancara dengan Bapak Darto pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017).

Dari penjelasan diatas menunjukkan cara perusahaan dalam menarik minat petani agar bermitra dengan perusahaan. Perusahaan menggandeng petani mitra yang sebelumnya untuk menarik minat petani yang belum bermitra. Petani mitra yang berfungsi sebagai perantara juga sangat membantu dalam jaringan kerjasama kemitraan ini. Keberhasilan dan pemberian modal awal yang diberikan perusahaan juga sebagai penarik minat petani agar bermitra dengan perusahaan. Dengan keberhasilan dalam mengembangkan pertanian tembakau dan menggaet petani lain agar bermitra akhirnya terjalin hubungan kerjasama antara petani tembakau dan perusahaan dalam kemitraan pertanian tembakau.

Jaringan yang terjalin antara perusahaan dan petani tembakau berkembang secara bertahap. Kerjasama yang terjalin semakin erat sehingga jaringan yang terjalin semakin kuat. Jaringan di dalam modal sosial terdapat jaringan sosial yang kuat dan modal sosial yang lemah. Dalam jaringan yang kuat terdapat kepercayaan didalamnya dan sebaliknya jika jaringan lemah maka tidak ada kepercayaan di dalamnya. Kerjasama antara perusahaan dan petani tembakau semakin kuat maka dalam mencapai tujuan akan semakin cepat dituju.

Jaringan pertanian tembakau tidak hanya dilakukan antara petani dan petani atau perusahaan dan petani saja. Dalam pengembangan pertanian tembakau juga melibatkan pihak lain yang terlibat dalam jaringan.

“kemitraan jelas antara perusahaan dan petani tembakau, tapi dalam program kemitraan ini perusahaan berharap pada dinas yang terkait. Dukungan dari dinas pertanian terkait agar peningkatan kesejahteraan petani meningkat terus bareng sama peningkatan pasokan tembakau dalam negeri untuk industri tembakau” (hasil wawancara dengan Bapak Darto pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017)

Pemaparan diatas merupakan wujud dari perluasan jaringan dalam kemitraan tembakau. sebelumnya yang hanya terjalin kerjasama antara perusahaan dan petani tembakau, kini semakin memperluas jaringan. Perluasan tersebut dilakukan kepada dinas pertanian sebagai pihak yang terkait dalam pengembangan pertanian tembakau.

Ketika kerjasama kemitraan antara perusahaan dan petani mengalami keberhasilan maka membuat adanya perluasan jaringan. Keberhasilan pada waktu sebelumnya pada jaringan ini akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya (Putnam, 1995: 66). Pada jaringan kerjasama kemitraan antara perusahaan dan petani tembakau yang mencapai hasil yang dituju maka jaringan tersebut diperluas untuk melanjutkan pengembangan pertanian yang bertujuan mensejahterakan pihak-pihak yang terlibat.

Dalam jejaring sosial perlu adanya kerjasama dengan pihak yang lebih tinggi untuk mempercepat mencapai tujuan. Jaringan tidak hanya terjalin antara petani tembakau dan perusahaan saja. Tetapi dalam kemitraan pertanian tembakau membutuhkan pihak lain dalam tujuan mensejahterakan petani tembakau. Perluasan jaringan dilakukan dengan dinas pertanian. Modal sosial yang menjembatani (*bridging sosial kapital*) mencakup ikatan yang lebih longgar

(Putnam dalam Field, 2016: 33). Dengan membangun jaringan dengan dinas pertanian akan lebih mudah dalam mencapai tujuan dalam kerjasama yang saling menguntungkan karena adanya pihak yang mengawasi dalam kemitraan pertanian tembakau ini. Perluasan jaringan yang dilakukan tersebut merupakan modal sosial dalam bentuk *bridging* sosial *capital*.

Jaringan itu dibentuk untuk tujuan pengembangan pertanian tembakau dan proses saling menguntungkan pihak yang terlibat. Dengan bekerjasama dengan dinas pertanian akan lebih mudah dalam masalah legalitas tentang pertanian tembakau dan pengawas dalam kemitraan pertanian tembakau. Jaringan sosial sangat dibutuhkan karena jaringan sosial berfungsi menyebarkan informasi ke seluruh anggota, yang memungkinkan mereka mampu mengambil tindakan secara kolektif untuk mengatasi masalah secara bersama-sama (Lawang, 2004). Jaringan yang kuat dan terikat membuat modal sosial yang terjalin di dalam relasi antara perusahaan dan petani tembakau semakin baik, dengan tujuan agar saling menguntungkan membuat semakin kuat jaringan yang terjalin.

Petani tembakau memiliki jaringan saat menjual hasil panennya saat ini dengan bermitra dengan perusahaan. Akses dan informasi yang diperoleh membuat semakin mudahnya mencapai tujuan dalam pemenuhan kebutuhan. Pada saat petani tembakau tidak memiliki akses dan jaringan maka petani memiliki kesusahan dalam penjualan dan pengembangan pertanian tembakau. dalam modal sosial terdapat dua bentuk jaringan yaitu *bonding* sosial *kapital* dan *bridging* sosial *kapital*. Menurut Putnam (dalam Field, 2016:33) Modal sosial yang mengikat (*Bonding Sosial Kapital*), yang berarti ikatan antar orang dalam situasi yang sama, seperti keluarga dekat, teman akrab dan rukun tetangga. Sedangkan

modal sosial yang menjembatani (*Bridging Sosial Capital*), yang mencakup ikatan yang lebih longgar dari beberapa orang, seperti teman jauh dan rekan bekerja.

Dalam relasi antara perusahaan dan petani tembakau menerapkan dua bentuk jaringan tersebut dalam membuka jaringan. Dalam kemitraan pertanian tembakau yang terjalin antara perusahaan dan petani tembakau sebagai usaha pengembangan tembakau dan kesejahteraan pihak yang terkait merupakan ikatan *bonding* yang terjalin. Ikatan *bridging* yang terjalin yaitu antara kemitraan pertanian tembakau dengan pihak yang lebih luas dalam hal ini adalah dinas pertanian.

Kepercayaan merupakan suatu hal yang harus dibangun dan dipelihara di dalam suatu hubungan sosial. Kepercayaan tidak semata-mata muncul di dalam hubungan sosial, tetapi diperlukan interaksi positif dan tindakan kooperatif yang terjadi secara terus menerus di antara aktor yang terlibat. Kepercayaan merupakan kumpulan dari berbagai bentuk interaksi sosial di dalam hubungan sosial dalam hal ini terjadi dalam kemitraan pertanian tembakau. Kepercayaan sangat penting dalam pencapaian tujuan bersama, sehingga sangat penting untuk memupuk rasa percaya pada setiap pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan pertanian tembakau.

Kepercayaan merupakan bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin bahwa pihak lain juga melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan bertindak dalam pola saling mendukung dan tidak merugikan pihak lain yang terlibat (Putnam, 2000: 19). Ketika dalam hubungan sosial didasari oleh kepercayaan, maka akan cepat

terwujud tujuan yang akan dicapai. Selain itu, Putnam menjelaskan pentingnya memberikan penghargaan dalam hubungan sosial sehingga mewujudkan suatu kepercayaan.

Rasa percaya yang terjalin diantara anggota tersebut, pada akhirnya akan menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis dalam kemitraan pertanian tembakau. Serta dapat menjadi indikator terwujudnya modal sosial yang baik. Putnam menjelaskan bahwasannya kepercayaan sosial pada dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang baik, modal sosial yang baik ditandai dengan adanya lembaga-lembaga sosial yang kokoh sehingga modal sosial melahirkan kehidupan yang harmonis (Putnam, 1995 dalam Soeharto 2005). Modal sosial yang baik akan berpengaruh pada keberhasilan lembaga tersebut dalam mewujudkan tujuannya.

Dalam relasi antara petani tembakau dan perusahaan juga memanfaatkan kepercayaan dalam hubungan kerjasama kemitraan pertanian tembakau. Tujuan dalam pengembangan tanaman tembakau sebagai komoditi industri sehingga memerlukan kerjasama atas dasar saling percaya.

“adanya petani mitra sangat membantu perusahaan dalam pemenuhan tembakau. tembakau yang dihasilkan petani mitra diserap semuanya oleh perusahaan. Hubungan kerjasama kita ya saling menguntungkan sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, tidak hanya menguntungkan perusahaan saja. Kita sama-sama bekerjasama dalam mewujudkan tujuan kemitraan pertanian tembakau ini” (hasil wawancara dengan Bapak Darto pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017)

Sebagaimana diungkapkan Putnam (2000) bahwasannya kepercayaan akan tumbuh jika diantara kedua belah pihak memiliki nilai yang sama yang dilihat melalui persahabatan. Selain memiliki nilai yang sama, memiliki kepentingan yang sama juga dapat memunculkan kepercayaan di dalamnya. Salah satu hal

yang penting dalam tumbuhnya kepercayaan adalah dengan adanya hubungan timbal balik antara kedua belah pihak.

Kepercayaan akan terjaga apabila dalam kerjasama pihak-pihak yang terlibat saling memahami. Jika terdapat salah satu pihak yang tidak menjaga kepercayaan yang mereka bangun maka akan merusak hubungan yang telah terjalin. Dalam hal ini misalkan terdapat salah satu pihak yang tidak jujur maka rasa kepercayaan akan menurun. Putnam (2000) juga berpendapat ketidakjujuran merupakan salah satu yang membuat turunnya suatu kepercayaan. Seperti misalnya, dalam relasi antara petani tembakau dan perusahaan, petani tidak menjual hasil panen sepenuhnya kepada perusahaan dan menjual kepada perusahaan lainnya.

Jika tidak ada kepercayaan dalam sebuah jaringan sosial maka hubungan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Kepercayaan harus ada di dalam hubungan kerjasama ini. Bila dalam hubungan relasi antara petani tembakau dan perusahaan terdapat kepercayaan maka kerjasama tersebut akan berjalan dengan baik. Apabila dalam hubungan terbangun suatu kepercayaan maka hubungan tersebut akan lebih bisa menyatu dan kepercayaan merupakan modal sosial yang dimiliki untuk lebih bisa dipercaya orang lain.

Saat membicarakan norma, komponen ini tidak bisa dilepaskan dari atribut modal sosial lainnya yaitu kepercayaan dan jaringan. Dengan adanya norma diharapkan terjalin kesesuaian antar individu yang dapat menambah rasa percaya dan tercipta sebuah jaringan sosial yang harmonis. Hubungan sosial dalam kemitraan pertanian tembakau, norma berperan dalam mengatur dan mengontrol

tindakan dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Tujuan dari hal tersebut agar mampu mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang bisa memicu permasalahan atau hal-hal yang merugikan.

Putnam (dalam Lawang, 2004) menjelaskan norma merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi oleh anggotanya. Pada saat norma telah dipatuhi oleh anggotanya maka tidak perlu adanya kontroling khusus saat menjalankan kerjasama. Dalam relasi antara petani tembakau dan perusahaan memiliki norma yang harus dipatuhi oleh pihak yang ada di dalamnya. Pada saat kerjasama berlangsung, petani tembakau dan perusahaan menerapkan norma dalam kerjasamanya.

“benar kita ada kontrak kerjasama dengan petani tembakau, kontrak kerjasama dilakukan pada saat akan mulai masuk musim tanam. Kontrak kerjasama petani mendapatkan pendampingan pertanian, akses permodalan, sarana dan prasarana pertanian, serta jaminan akses pasar yang sangat diperlukan oleh petani. Mereka juga mendapatkan informasi dan bimbingan mengenai praktik pertanian yang baik untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, produktivitas, serta penghasilan yang diterima dari panen tembakau” (hasil wawancara dengan Bapak Wiwin pada hari Senin tanggal 4 September 2017)

Senada dengan pernyataan Bapak Wiwin,

“iya ada, modelnya kayak kesepakatan. Jadi petani dan perusahaan membuat kesepakatan ya kayak kontrak kerja sama. Jadi isinya ya bahas masalah pendampingan, modal awal yang perusahaan kasih. Modal awal ya ngasih uang, pupuk, atau bibit yang nanti dipotong sama hasil panennya. ya harganya juga disepakati di kontrak kerja sama itu” (hasil wawancara dengan Bapak Anwar pada hari Senin tanggal 4 September 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui relasi petani tembakau dan perusahaan dalam kemitraan pertanian tembakau menerapkan sebuah norma. Norma yang mereka buat merupakan norma yang mengikat, sehingga hubungan relasi di dalamnya harus dilaksanakan sesuai norma yang berlaku. Dalam

kerjasama keduanya, norma yang disepakati berbentuk kesepakatan sehingga dijalankan dengan rasa percaya.

Norma yang didasari oleh rasa percaya maka akan menurunkan biaya transaksi dan memfasilitasi kerjasama (Putnam, 1993: 172). Norma yang berdasarkan kesepakatan petani tembakau dan perusahaan merupakan salah satu untuk menjaga kepercayaan di dalamnya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan norma dalam modal sosial yang terjadi di dalam relasi petani tembakau dan perusahaan. Norma yang dibentuk atas kepercayaan membuat kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Penerapan norma dalam kerjasama kemitraan pertanian tembakau dilakukan oleh petani tanpa rasa dibebani karena aturan yang mengikat.

“...ngga ada beban, kan itu kesepakatan dari awal. Kalo dari awal ga sesuai dengan kemampuan dan yang kita pengen ya kita bilang, kan pasti kontrak kerjasama itu nyari solusi buat bersama. Bukan buat untung salah satu pihak aja” (hasil wawancara dengan Bapak Anwar pada hari Senin tanggal 4 September 2017)

“...kesepakatan kerjasama, namanya kesepakatan ya udah sepakat isi di dalamnya apa. Jadi ya harus dipatuhi aturan yang ada. Ga ada beban atau yang memberatkan soalnya ya nguntungin saya dan banyak membantu buat nanem sampek panen tembakau itu...” (hasil wawancara dengan Bapak Suherma pada hari Rabu tanggal 6 September 2017)

Aturan yang ada di dalam relasi petani tembakau dan perusahaan memiliki tujuan tersendiri. Aturan yang ada bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kelalaian dalam hubungan kerjasama tersebut. Seperti saat perusahaan telah ada kesepakatan hasil panen petani yang harus dijual ke perusahaan maka petani harus menjual hasil panennya kepada perusahaan karena telah ada kesepakatan kerjasama di dalamnya. Dalam pembuatan kontrak kerjasama ini, pihak perusahaan tidak membuatnya secara sepihak saja, melainkan dengan membuat kesepakatan

dengan petani tembakau. kesepakatan kontrak kerjasama yang dibuat oleh perusahaan dan petani tembakau membuat adanya rasa kepercayaan di dalamnya sehingga aturan tersebut dijalankan sesuai yang telah disepakati.

Kontrak kerjasama yang dijalankan antara perusahaan dan petani tembakau yang bersifat terikat sebagai acuan kerjasama kedua belah pihak. Penerapan kerjasama tersebut memberi kemudahan untuk petani dalam mengembangkan tembakaunya.

“...masalah harga, masalah modal, pembimbingan pertanian itu sangat membantu kita dalam produksi tembakau ini. Kita tidak bingung nyari pasar, ngga bingung modal ya tinggal nanem yang bener terus panen...” (hasil wawancara dengan Bapak Anwar pada hari Senin tanggal 4 September 2017)

“...tentunya yang masalah nanti harga jual tembakau yang saya panen itu yang telah disepakati, jadi ya ga bingung lagi nanti mau dijual berapa, apa harganya naik apa turun. Jadi tinggal ngitung dapet berapa terus dipotong dari modal yang dikasih perusahaan. Saling menguntungkan lah intinya...” (hasil wawancara dengan Bapak Suherma pada hari Rabu tanggal 6 September 2017)

Kesepakatan kerjasama yang dibuat kedua belah pihak merupakan kesepakatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Norma yang berlaku merupakan kesepakatan kerjasama yang saling menguntungkan. Keuntungan yang dimaksud yaitu perusahaan mendapat suplay tembakau dari petani dan petani tembakau mendapat bantuan modal diawal kesepakatan sampai pembelian hasil panen dari petani yang diserap semuanya oleh perusahaan,

Adanya norma yang mengatur di dalam relasi antara petani dan perusahaan dalam kemitraan pertanian tembakau maka norma tersebut harus dipatuhi dan dijalankan bersama. Dalam modal sosial sendiri dijelaskan bahwa norma yang dijalankan dan ditaati harus dijalankan bersama tanpa merugikan salah satu pihak. Sehingga norma yang dijalankan saling menguntungkan satu sama lain dan sebagai dasar dalam kerjasama. Norma yang berbentuk kesepakatan kontrak

kerjasama ketika ada yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut dapat secara tertulis atau tidak tertulis.

Norma yang disepakati dalam kesepakatan kontrak kerjasama antara perusahaan dan petani tembakau wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak dan jika ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi.

“iya pasti lah, melanggar kesepakatan kontrak kerjasama sama aja langsung pemutusan kemitraan. Tetapi kalo itu melanggar kesepakatan kerja yang tidak bisa ditoleransi kayak jual hasilnya ke perusahaan lain. Kalo yang biasa-biasa ya diperingati aja dari perusahaan” (hasil wawancara dengan Bapak Anwar pada hari Senin tanggal 4 September 2017)

Aturan atau norma yang dibuat dan disepakati bersama baik yang tertulis maupun tidak tertulis wajib untuk dipatuhi dan ditaati. Ketika ada yang menyimpang atau melanggar akan dikenakan sanksi, begitu juga dengan kontrak kerjasama antara petani tembakau dan perusahaan. Kontrak kerjasama yang diberlakukan untuk kedua belah pihak. Bagaimanapun norma tersebut dilanggar atau tidak dipatuhi maka yang melanggar dan tidak mematuhi akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran dan disesuaikan dengan kesepakatan kontrak kerjasama. Sanksi yang diberikan mulai dari peringatan sampai pemutusan kontrak kerjasama.

“...kebanyakan sanksi ya yang ringan Cuma diperingatkan, kayak ga memberikan perkembangan bagaimana perkembangan tanaman yang ditanam, sampai yang berat ya pemutusan kontrak kerjasama terus mengganti jumlah biaya yang diberikan pas awal kontrak kerjasama itu. Kalo yang berat kayak menjual hasil tanamannya ke pengepul atau gudang perusahaan lain, padahal kan sudah kontrak kerjasama dengan perusahaan kita. Tapi selama ini belum ada yang sampai kayak gitu. Selama ini masih belum dengar yang sampai menjual ke perusahaan lain padahal sudah kontrak dengan kita..” (hasil wawancara dengan Bapak Darto pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017)

Dengan melihat adanya pelanggaran terhadap norma yang berupa kesepakatan kerjasama, pihak perusahaan memberikan sanksi berupa peringatan sampai

dengan pemutusan kontrak kerjasama dan penggantian rugi terhadap modal yang telah diberikan pada awal kontrak kerjasama tersebut. Sanksi yang diberikan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam kontrak kerjasama tersebut. Putnam (1993) menjelaskan dalam tulisannya jika norma yang telah disepakati bersama harus dipatuhi. Dengan diberlakukannya norma dalam kemitraan pertanian tembakau telah dipatuhi dan dilaksanakan bersama. Kesepakatan kerjasama yang diberlakukan dalam kemitraan pertanian tembakau merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai apa yang dilanggar. Dari peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa norma sangatlah penting dalam memperkuat hubungan dalam hal ini kerjasama kemitraan pertanian tembakau.

Setiap orang wajib memiliki modal sosial, jika seseorang memiliki modal sosial maka akan lebih mudah dalam menjalankan suatu kehidupan. Norma merupakan salah satu indikator dalam modal sosial, siapa saja yang menjalankan norma maka dia akan mudah dalam menjalankan kehidupannya. Tetapi jika seseorang tersebut melanggar norma yang ada maka akan sulit dalam berkehidupan dan mengembangkan potensi yang ada. Norma juga diterapkan pada kemitraan pertanian tembakau dalam kerjasama antara petani tembakau dan perusahaan. Norma akan mudah dijalankan jika kedua belah pihak saling mengerti dan memahami karena jika melakukannya akan memberi manfaat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berlakunya Perda Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2003 tentang pengusahaan tembakau, membuat berubahnya bentuk tataniaga pertembakauan di Desa Kalisat. Sebelum berlakunya perda, sistem tataniaga tembakau melalui banyak tahapan yang dilalui. Tataniaga tembakau yang memakai pola bertingkat, sehingga banyak yang terlibat dalam tataniaga tembakau. Aktor yang terlibat adalah *bandol*, pemilik gudang, dan pabrik. Rantai tataniaga yang panjang cenderung menempatkan petani dalam posisi yang tidak diuntungkan, karena pabrik tidak bersedia bertransaksi langsung dengan petani. Hal tersebut menempatkan *bandol* sebagai posisi yang sentral. *Bandol* memiliki akses eksklusif terhadap pabrik. Perda Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2003 tentang pengusahaan tembakau berlaku, membuat sistem tataniaga bersifat kemitraan. Kemitraan pertanian tembakau membuat pabrik khususnya Perusahaan Tembakau langsung membeli tembakau dari petani dan memberikan bantuan modal di awal serta penentuan harga tembakau.

Kerjasama akan muncul ketika terdapat hubungan yang saling mengikat dalam sebuah jaringan sosial. Dalam kerjasama, setiap pihak yang terlibat memberikan hak dan kewajibannya untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kesepakatan atau norma yang telah ditentukan dan dijalankan. Pembentukan norma digunakan sebagai ketentuan pihak-pihak yang terlibat tanpa perlu saling mengawasi. Norma dilaksanakan jika pihak-pihak yang terlibat di dalamnya saling percaya. Norma dan kepercayaan yang saling berkesinambungan merupakan indikator keberhasilan kerjasama.

Jaringan yang terbangun sangat dibutuhkan dalam setiap operasional pertanian tembakau, sama halnya yang dilakukan petani tembakau. Jaringan ini merupakan jaringan yang terjadi antara petani tembakau yang ada di Desa Kalisat. Kerjasama yang dibangun antara sesama petani tembakau dan antara petani dan perusahaan merupakan hubungan kerjasama dalam pertanian tembakau dengan tujuan kesejahteraan bersama. Jaringan yang mengikat merupakan jaringan yang terjalin antara orang dalam situasi yang sama yang saling mengikat.

Dalam relasi antara petani tembakau dan perusahaan juga memanfaatkan kepercayaan dalam hubungan kerjasama kemitraan pertanian tembakau. Tujuan dalam pengembangan tanaman tembakau sebagai komoditi industri sehingga memerlukan kerjasama atas dasar saling percaya. Norma merupakan salah satu indikator dalam modal sosial, siapa saja yang menjalankan norma maka dia akan mudah dalam menjalankan kehidupannya. Tetapi jika seseorang tersebut melanggar norma yang ada maka akan sulit dalam berkehidupan dan megembangkan potensi yang ada. Norma juga diterapkan pada kemitraan pertanian tembakau dalam kerjasama antara petani tembakau dan perusahaan. Norma akan mudah dijalankan jika kedua belah pihak saling mengerti dan memahami karena jika melakukannya akan memberi manfaat. Modal sosial dalam bentuk jaringan, kepercayaan, dan norma yang dijalankan dalam kemitraan pertanian tembakau dengan tujuan mengembangkan pertanian tembakau dan lebih mensejahterakan petani tembakau telah berjalan dengan baik dan berhasil.

6.2. Saran

6.2.1 Saran Praktis

Sebagai peneliti, harapannya melalui penelitian yang berjudul **MODAL SOSIAL DALAM KEMITRAAN PERTANIAN TEMBAKAU ANTARA**

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S. 2016. *Pengaruh Unsur Modal Sosial Terhadap Keberhasilan Kelompok Tani-Ternak Penerima Bantuan Program Sarjana Membangun Desa (SMD) Di Kabupaten Bone*. Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar.
- Aifin, Edy Burhan dan Djoko Suryo . 1989. *Emas Hijau di Jember : Asal-usul, pertumbuhan dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat 1860-1930-an*. Thesis. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Brata, Wisnu. 2012. *Tembakau Atau Mati*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Creswell, John. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. 2014. *Penelitian kualitatif dan Desain Riset (Memilih diantara lima pendekatan)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Field, John. 2010. *Modal Sosial (Sosial Capital)*. Edisi Indonesia. Nurhadi (Penerjemah). Inyik Ridwan Muzir (Ed.). Bantul: Kreasi Wacana.
- _____. 2011. *Modal sosial*. Bantul: Kreasi Wacana.
- _____. 2016. *Modal sosial*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Herdiansyah, H.. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Jhonson, Doyle Paul. 1988. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Terj. Robert. M. Z. Lawang. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kimbal, Rahel Widiawati. *Modal Sosial Dan Ekonomi Industri Kecil: Sebuah Studi Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Khoiri, M. Darul. 2017. *Modal Sosial Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wisata Di Objek Wisata Edukasi Kampung Coklat*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Latifah, Hikmah Nur. 2010. *Sikap Petani Tembakau Terhadap Program Kemitraan PT Gudang Garam Di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Lawang, R. M.. 2004. *Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologi: Suatu Pengantar*. Depok: FISIP UI Press.
- Murdiyanto, Eko. 2008. *Sosiologi Perdesaan : Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*. Yogyakarta : Wiyama Press.
- Markus, Dkk. 2015. *Petani Tembakau Di Indonesia : Sebuah Paradoks Kehidupan*. Yogyakarta : Leutikaprio.
- Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Moleong, Lexy. J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nan lin. 1999. *Building a Network Theori of Sosial Capital*. Dept. Sociology. Duke University.
- Pradita, V. A. (2014). *Analisis Perbedaan Petani Tembakau Non Mitra Dengan Petani Tembakau Mitra PT. Gudang Garam Di Desa Woro, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Priyono, A. 2013. *Nilai-Nilai Kebertahanan Petani Tembakau (Studi Terhadap Moral Ekonomi Petani Tembakau Desa Glagah Wero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)*. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013.
- Putnam, R.D. 1993. *The Presperous Community Sosial Capital and Public Life*. American Prospect.
- _____. 2000. *Bowling Alone: The collapse and a Revival of American Community*. New York: Simon and Schuster
- _____. 1995. *Boeling Alone :America's Declining Sosial capital*. *Journal of Democracy* 6:1, januari 1995 pp65-78: The Jhon Hopkins University Press
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiarawacana.
- Sasongko, Y. A. T., & Wahyuni, E. S. 2015. Diaspora Madura: Analisis Modal Sosial Dalam Usaha Sektor Informal Oleh Migran Madura di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(1).
- Singgih, Doddy S. "Metode Analisis Fungsi Lahan," Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Th XII, No 3, Juli 1999, 1-8.
- Suharto, E. 2005. *Modal Sosial Dan Kebijakan Sosial*. Retrieved Februari 20, 2016, from

http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/MODAL_SOSIAL_DAN_KEBIJAKAN_SOSIA.pdf

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta
- Wardhono, A. 2009. Transformasi Kelembagaan Kepemilikan Tanah Desa Klompangan Kabupaten Jember. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 3(2), 1-10.
- Widodo, K.. 2015. *Analisis Pengaruh Modal Sosial Terhadap Produktivitas Lahan Jagung (Studi Kasus: Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Wolf, Eric R. 1985. *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yin, Robert K. 2012. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

